

P. BULAN TANJUNG PINANG

Keberadaan Paguyuban-Paguyuban Etnis Di Daerah Perantauan Dalam Menunjang Pembinaan Persatuan Dan Kesatuan

(Kasus Perantauan Etnik Jawa Di Tanjung Pinang)



Direktorat
dayaan
4

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
BAGIAN PROYEK PENGKAJIAN DAN PEMBINAAN
KEBUDAYAAN MASA KINI
JAKARTA 1999 / 2000**

305.809814
WIS u

**KEBERADAAN PAGUYUBAN-PAGUYUBAN ETNIS
DI DAERAH PERANTAUAN DALAM MENUNJANG
PEMBINAAN PERSATUAN DAN KESATUAN
(Kasus Perantau Etnik Jawa di Tanjungpinang)**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
BAGIAN PROYEK PENGKAJIAN DAN PEMBINAAN
KEBUDAYAAN MASA KINI
JAKARTA 1999 / 2000**

**KEBERADAAN PAGUYUBAN-PAGUYUBAN ETNIS DI DAERAH
PERANTAUAN DALAM MENUNJANG PEMBINAAN PERSATUAN
DAN KESATUAN : (Kasus Perantau Etnik Jawa di Tanjungpinang)**

Tim Penulis : Wisnu Subagijo
Sindu Galba

Penyunting : Sumarsono

Hak cipta dilindungi oleh Undang-undang

Diterbitkan oleh : Bagian Proyek Pengkajian dan Pembinaan Kebudayaan
Masa Kini Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional
Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan

Jakarta 1999

Edisi 1999

Dicetak oleh : **CV. BIMA SAKTI RAYA**

SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN

Pembinaan nilai-nilai budaya Indonesia ditekankan pada usaha menginventarisasi dan memasyarakatkan nilai-nilai budaya Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Sehubungan dengan itu program pembinaan kebudayaan diarahkan pada pengembangan nilai-nilai budaya Indonesia yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa sehingga dapat memperkuat kepribadian bangsa, mempertebal rasa harga diri, memunculkan kebanggaan nasional serta memperkuat jiwa kesatuan.

Penerbitan buku sebagai upaya untuk memperluas cakrawala budaya masyarakat patut dihargai. Pengenalan aspek-aspek kebudayaan masa kini diharapkan dapat dipakai sebagai kerangka acuan dalam menghadapi perkembangan jaman yang semakin kompleks. Oleh karena itu, kami dengan gembira menyambut terbitnya buku hasil kegiatan **Bagian Proyek Pengkajian dan Pembinaan Kebudayaan Masa Kini** Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat Jendral Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

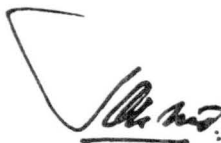
Penerbitan buku ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai aneka ragam kebudayaan di Indonesia. Upaya ini menimbulkan kesalingkenalan, dengan harapan akan tercapai tujuan pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional.

Berkat kerjasama yang baik antara tim penulis dengan para pengurus proyek buku ini dapat diselesaikan. Buku ini belum merupakan hasil suatu penelitian sehingga masih terdapat kekurangan-kekurangan. Di harapkan hal tersebut dapat disempurnakan pada masa yang akan datang.

Sebagai penutup kami sampaikan terima kasih kepada pihak yang telah menyumbang pikiran dan tenaga bagi penerbitan buku ini.

Jakarta, Juli 1999

Direktur Jenderal Kebudayaan

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'I.G.N. Anom', written over a horizontal line.

I.G.N. Anom
NIP. 130353848

PRAKATA

Pada era globalisasi ini, kemajuan teknologi telah menyebabkan interaksi diantara bangsa-bangsa di dunia tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kejadian di belahan dunia yang satu segera dapat dirasakan dan dinikmati oleh belahan dunia yang lain. Begitu intensifnya komunikasi antarbangsa dewasa ini telah menyebabkan akulturasi kebudayaan dengan cepat merambah hampir disetiap sektor kehidupan.

Bertitik tolak dari kondisi tersebut Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan melalui Bagian Proyek Pengkajian dan Pembinaan Kebudayaan Masa Kini berupaya untuk merekam berbagai perubahan kebudayaan. Dengan mengetahui perubahan-perubahan yang terjadi diharapkan dapat dipersiapkan tatanan masyarakat yang sesuai dengan perkembangan jaman.

Penerbitan buku hasil perekaman ini merupakan suatu upaya untuk menyebarluaskan informasi kebudayaan mengenai berbagai gejala sosial, serta perkembangan kebudayaan, seiring kemajuan dan peningkatan pembangunan. Upaya ini dirasa perlu sebab segala tindakan pembangunan tentu akan memunculkan tanggapan bagi masyarakat di sekitarnya. Oleh karena itu memahami gejala sosial akibat dari pembangunan perlu dilakukan agar dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Kepada tim penulisan dan semua pihak baik lembaga pemerintah maupun swasta yangtelah membantu sehingga terwujudnya karya ini disampaikan terima kasih.

Kami menyadari bahwa karya tulis ini belum memadai, diharapkan kekurangan-kekurangan itu dapat disempurnakan pada masa yang akan datang. Semoga karya tulis ini bermanfaat bagi para pembaca serta memberikan petunjuk bagi kaji selanjutnya.

Jakarta, Juli 1999

**Bagian Proyek Pengkajian dan
Pembinaan Kebudayaan Masa Kini**

Pemimpin,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'W' followed by a horizontal line and a small flourish at the end.

Wisnu Subagijo, BA
NIP. 130517125

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar	1
B. Masalah	3
C. Kerangka Pemikiran	4
D. Ruang Lingkup Perekaman	6
E. Tujuan Perekaman	7
F. Metode Perekaman	7
G. Susunan Laporan	8
BAB II. PAGUYUBAN AMONG MITRO DI KOTA TANJUNGPINANG	
A. Gambaran Umum Kota Tanjungpinang	11
B. Lahirnya Paguyuban Among Mitro dan Perkembangannya	25
C. Kegiatan-Kegiatan Paguyuban Among Mitro	31

BAB III. PERANAN PAGUYUBAN AMONG MITRO TERHADAP ANGGOTANYA	
A. Kehidupan Sosial	33
B. Kehidupan Budaya	36
C. Kehidupan Ekonomi	39
D. Kehidupan Politik	42
BAB IV. PERANAN PAGUYUBAN TERHADAP MASYARAKAT SEKITARNYA	
A. Hubungan Paguyuban dengan Paguyuban Lainnya	46
B. Hubungan Paguyuban dengan Masyarakat Lokal	48
C. Hubungan Paguyuban dengan Pemerintah Daerah Setempat	51
D. Hubungan Paguyuban dengan Pemerintah Daerah Asal	52
BAB V. ANALISIS	
A. Kekuatan Sentripetal	55
B. Kekuatan Sentrifugal	58
BAB VI. PENUTUP	59
KEPUSTAKAAN	63
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Daftar Informan	64
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Paguyuban Among Mitro	65
3. Dewan Pengurus Pusat Among Mitro	89

DAFTAR PETA DAN GAMBAR

Halaman

PETA

1. Kota Administratif Tanjungpinang 14

GAMBAR

1. Pintu masuk wilayah pertokoan Tanjungpinang dilihat dari depan 16
2. Kantor Kota Administrasi Tanjungpinang 16
3. Pelabuhan Tanjung Pinang berlatarbelakang Kantor Administratif Pelabuhan Tanjungpinang 17
4. Bangunan rumah penduduk di Tanjungpinang dekat pelabuhan yang kebanyakan dihuni oleh orang Cina 17

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar

Banyak faktor yang menyebabkan orang merantau seperti dari desa ke kota atau dari kota kecil ke kota besar. Namun demikian, dari beberapa faktor itu dapat dikelompokkan menjadi dua yakni faktor penarik dan faktor pendorong. Kota-kota besar di Indonesia mempunyai peranan tersendiri dan menentukan baik dalam perkembangan kebudayaan, pembaharuan, perkembangan ekonomi, tempat pendidikan, dan hiburan, serta hal-hal yang berbaur dengan gemerlapan lainnya.

Orang-orang dari desa atau orang dari kota-kota kecil tertarik ke kota (besar) merupakan hal yang wajar oleh sebab faktor-faktor seperti di atas tadi. Hanya saja alasan ketertarikan dari masing-masing individu itu cukup beragam. Alasan yang membuat mereka pindah ke kota antara lain melanjutkan sekolah karena di desa tidak ada kelanjutannya atau mutunya kurang baik, kesempatan mencari kerja atau mengembangkan usaha di kota lebih terbuka, tingkat upah lebih tinggi, hiburan lebih banyak, dan masih banyak sebab lainnya. Daya tarik inilah yang merupakan salah satu sebab mengapa daerah perkotaan menjadi padat. Kepadatan ini selain dari arus urbanisasi juga pertambahan penduduk secara alami. Dalam sensus tahun 1990, penduduk Indonesia mencapai 180 juta jiwa yang diantaranya sebesar 56 juta (31% atau sepertiga) tinggal di kota-kota.

Sementara itu faktor pendorong orang desa ke kota lebih karena kondisi daerah desa pada umumnya. Faktor-faktor pendorong ini kebalikan dari faktor penarik sehingga penduduk desa pindah ke kota. Kurangnya lapangan kerja makin menyempitnya kemungkinan berusaha dan larinya hasil-hasil dari desa untuk pembangunan di kota-kota besar semakin mendorong penduduk meninggalkan desanya. Mereka pergi atau merantau ke kota untuk mendapatkan kesempatan dan kenikmatan hidup yang lebih baik daripada di desanya.

Penduduk yang pindah dari desa ke kota tidak terbatas desa tertentu ke kota tertentu dan juga berasal dari berbagai etnis. Hal ini berlaku hampir di seluruh kota-kota besar di Indonesia. Dengan beraneka ragamnya asal pendatang/perantau, maka penghuni kota pun menjadi heterogan, baik dari etnis maupun daerah asal. Jumlah perantau ini dari tahun ke tahun ada kecenderungan meningkat. Seperti misalnya Semarang sebagai ibu kota Provinsi Jawa Tengah, jumlah penduduknya selama 10 tahun (1961-1971) dari 503.153 jiwa menjadi 646.590 jiwa atau rata-rata 2,5% pertahun. Kemudian dalam dua periode selanjutnya (1971-1980) rata-rata 5,21% dan (1980-1990) rata-rata 5,21% per tahun (Profil Jawa Tengah, BPS, 1993).

Semakin meningkatnya penduduk perantauan dari berbagai asal (daerah dan atau etnik) di perkotaan semakin menambah pula beban kota itu sendiri maupun penghuninya. Padatnya penduduk kota akan meningkatkan saling ketergantungan, bertambah sumber salah paham dan konflik (Daldjoeni, 1978). Selain itu juga terjadinya persaingan antar individu semakin tajam, berkurangnya kebebasan individu, dan pembagian kerja semakin jelas, serta pemanfaatan waktu lebih ketat dan efisien. Hubungan antar individu lebih bersifat fungsional daripada sosial. Kontak sosial di daerah pedesaan bersifat intim (akrab), personal dan total. Sebaliknya pada penduduk perkotaan kontak sosialnya impersonal, segmental dan utilitar (berdasar pada manfaat). Individu memandang individu yang lain bukan sebagai pribadi apalagi yang utuh, tetapi sebagai pelaku dari peranan tertentu (fungsional)

Secara geografis, areal suatu kota dapat dikatakan lebih luas daripada desa. Seperti telah disebut di atas bahwa kontak sosial lebih bersifat fungsional. Misalnya pada kelompok karyawan perusahaan, meskipun mereka tiap hari bertemu dan melakukan kontak sesuai dengan peran masing-masing, tetapi tempat tinggal mereka menyebar atau berjauhan satu sama lain. Mereka pun jarang bertemu atau saling berkunjung selain di tempat pekerjaan atau pada acara khusus seperti perjamuan dengan pernikahan. Demikian pula di antara teman, sahabat, kerabat, ataupun saudara kendati tinggal satu kota, mereka jarang bertemu selain sibuk oleh urusan masing-masing juga tempat tinggalnya yang menyebar dan berjauhan.

Oleh karena hal-hal seperti tertera di atas, pada masyarakat kota ada kecenderungan untuk membentuk suatu wadah agar mereka bisa saling bertemu baik di antara teman, sahabat, kerabat baik yang seetnis atau sedaerah asal ataupun sesaudara. Wadah yang dimaksud berupa perkumpulan atau paguyuban.

B. Masalah

Dewasa ini di kota-kota tampak adanya eksklusifisme atau pengelompokan-pengelompokan masyarakat baik yang berdasarkan profesi, hobi, seni dan kedaerahan atau etnis. Apalagi penghuni kota itu memang heterogen. Dengan heterogennya penduduk kota mempunyai potensi untuk terjadinya konflik karena terdapat sejumlah perbedaan seperti status sosial, organisasi sosial-politik ataupun paguyuban-paguyuban seperti dalam uraian ini. Sudah barang tentu masing-masing kelompok cenderung mementingkan kepentingan kelompoknya sendiri. Sikap mementingkan kelompok sendiri ini bila berlebihan akan memancing reaksi pihak lain baik kelompok lain maupun masyarakat sekitarnya. Untuk menghindari perbedaan atau konflik bukan berarti meniadakan perbedaan atau kelompok-kelompok yang ada di masyarakat. Yang lebih penting bagaimana kelompok-kelompok itu tetap ada dan dapat berdampingan dengan kelompok lain atau dengan masyarakat sekitarnya.

Bagaimana kelompok-kelompok di masyarakat itu atau lebih tepatnya paguyuban itu bisa hidup berdampingan baik antara paguyuban satu dengan lainnya atau dengan masyarakat sekitarnya tanpa menimbulkan gejolak, perlu adanya pembinaan. Untuk melakukan pembinaan perlu adanya bahan. Bahan pembinaan itu bisa didapat dengan menjangkau informasi yang berkaitan dengan paguyuban itu sendiri sebagai berikut. Bagaimana hubungan paguyuban yang bersangkutan dengan paguyuban lainnya? Bagaimana hubungan paguyuban itu dengan masyarakat lokal/ di sekitarnya? Bagaimana hubungan paguyuban dengan Pemda setempat? Dan, bagaimana hubungan paguyuban dengan Pemda/daerah asal?

C. Kerangka Pemikiran

Kepulauan Nusantara yang merupakan wilayah negara RI diperkirakan dihuni tidak kurang dari 500 suku bangsa yang mengembangkan kebudayaan dan tradisi masing-masing secara mandiri (Budhisantoso, 1997). Pada awalnya suku-suku bangsa itu menduduki suatu wilayah tertentu. Pada perkembangan selanjutnya tidak sedikit anggotanya yang menyebar ke seluruh pelosok tanah air. Kecuali yang masih menetap di tempat asalnya, anggota suku bangsa yang bermigrasi itu sengaja atau terpaksa hidup bersama-sama dengan kelompok-kelompok yang berasal dari berbagai suku bangsa lainnya terutama di perkotaan.

Kota-kota di Indonesia berkembang cukup pesat terutama setelah Perang Kemerdekaan sekitar tahun 1950-an (DN. Marbun SH, 1979). Selama penjajahan Belanda, kota di Indonesia berkembang sangat lambat. Perkembangan yang nyata hanya pada kota-kota pusat perdagangan seperti Medan, Palembang, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Makassar, dan Jakarta (Batavia) sebagai pusat pemerintahan.

Masuknya penjajah Belanda membawa wajah dan masalah baru kota-kota di Indonesia. Sebagaimana umumnya kehidupan penduduk Indonesia yang berminat pada pencaharian di bidang pertanian, maka kota sebagai pusat perdagangan pada

perkembangannya menjadi pusat kebudayaan baru. Kebudayaan baru ini antara lain karena adanya hubungan antarbudaya dari penghuninya, baik dari suku bangsa-suku bangsa di Indonesia ataupun dari orang asing (luar Indonesia). Dengan demikian, masyarakat yang menghuni kota pun akan berbeda dengan masyarakat yang ada di desa-desa.

Perbedaan antara masyarakat yang tinggal di kota dan di desa dapat dilihat melalui ciri-cirinya. Dalam ilmu sosiologi dikenal istilah komunitas sebagai lawan *mass society*. Komunitas diperuntukkan pada pedesaan yang masyarakatnya bersatu dalam permukiman, mengidentikkan diri antarsesama, kuat dalam tradisi, maupun bekerja sama, dan nilai-nilai serta perhatian akan kebersamaan. Sementara itu, *mass society* diperuntukkan pada masyarakat kota yang anggotanya saling berpecah dan tidak saling mengenal, lebih terikat kontrak daripada kekeluargaan, hubungan serba lugas, lepas dari pribadi dan sentimen, tanpa ikatan tradisi dan tanpa kepemimpinan yang mapan (Daldoeni, 1978).

Tidak sedikit warga kota yang tinggal di kota baik yang sudah lama atau baru, belum bisa melepaskan pada budaya yang dibawa dari daerah asal seperti di desa dahulu. Kontak sosial di pedesaan bersifat intim (akrab), personal, dan total. Hal ini semakin jarang didapatkan orang yang tinggal di kota. Sementara itu kontak sosial bersifat impersonal, segmental, dan utilitar atau hanya berdasar azas manfaat. Seseorang kontak dengan orang lain hanya berdasarkan kepentingan. Dengan kondisi-kondisi seperti telah disebut di atas, seringkali manusia kota mengalami “kesendirian atau kesepian dalam keramaian”. Agar tidak merasa “sendiri” dan “sepi”, warga kota perlu berhubungan dengan orang lain yang bisa akrab, familiar, atau paling tidak bisa menciptakan suasana seperti di tengah keluarga atau di tempat asal. Untuk menciptakan suasana seperti itu diperlukan sarana yakni perkumpulan. Perkumpulan yang diharapkan ini biasanya berdasar pada kerabat, etnis atau daerah asal. Perkumpulan semacam ini dapat disebut seperti paguyuban.

Paguyuban berasal dari kata “guyub” yang dalam bahasa Jawa berarti “bersama-sama” atau “kumpul”. Dengan demikian paguyuban berarti perkumpulan. Anggota dari paguyuban ini biasanya berangkat dari asal yang sama seperti etnis atau daerah. Demikian pula paguyuban yang ada di kota Semarang ini anggotanya ada yang berdasar pada etnis atau daerah yang sama. Paguyuban kedaerahan adalah perkumpulan yang anggotanya berasal dari daerah yang sama. Daerah di sini lebih bersifat wilayah administratif bisa berarti desa, kecamatan, kabupaten atau kota kabupaten, dan propinsi. Selanjutnya, paguyuban etnis adalah perkumpulan yang anggotanya didasarkan pada kesamaan suku bangsa sehingga warna kultural pada paguyuban ini tampak kental.

Pada kenyataannya kadang sulit menentukan jenis kesukubangsaan seseorang, tetapi definisi suku bangsa dianggap begitu jelas oleh mereka yang terlibat di dalamnya. Biasanya kesukubangsaan seseorang ini bisa dirunut atas dasar keturunan. Seringkali definisi etnis berhimpitan dengan definisi kedaerahan sehingga tidak mudah untuk membedakan apakah suatu paguyuban merupakan paguyuban etnis atau paguyuban kedaerahan. Untuk selanjutnya, istilah paguyuban etnis dan kedaerahan disebut paguyuban saja (Sri Ahimsa Putra H.,1998).

D. Ruang Lingkup Perekaman

Paguyuban yang akan direkam adalah paguyuban yang didirikan oleh orang-orang Jawa di Tanjung Pinang, yang bernama Paguyuban Among Tirta. Paguyuban ini merupakan salah satu paguyuban-paguyuban yang bersifat etnis di Tanjung Pinang, yang bernama Paguyuban Among Tirta. Paguyuban ini merupakan salah satu paguyuban-paguyuban yang bersifat etnis di Tanjung Pinang. Di kota ini ada sejumlah paguyuban yang bersifat etnis, seperti paguyuban orang Batak, Minang, Flores dan lain-lain.

Paguyuban Among Tirta memenuhi kriteria yang dibuat dalam rangka mencari paguyuban yang dapat digunakan sebagai sampel. Kriteria tersebut adalah di bawah ini :

1. Keberadaan organisasi paguyuban berdasarkan etnik atau kedaerahan yang terdapat di Tanjung Pinang relatif lama, dan cukup langgeng serta aktif.
2. Paguyuban yang bersangkutan mempunyai beberapa kegiatan dan cukup dikenal oleh masyarakat sekitarnya.

Materi yang akan direkam melalui penelitian ini adalah :

1. Peranan paguyuban terhadap anggotanya, seperti kehidupan sosial; kehidupan ekonomi; kehidupan budaya; dan kehidupan politik.
2. Peranan paguyuban terhadap masyarakat sekitar, termasuk hubungan paguyuban dengan paguyuban lainnya; Hubungan paguyuban dengan masyarakat lokal; Hubungan paguyuban dengan pemerintah daerah setempat; dan Hubungan paguyuban dengan pemerintah daerah asal.

E. Tujuan Perekaman

Tujuan perekaman ini adalah untuk memahami kehadiran paguyuban-paguyuban dari perspektif fungsional, yaitu dengan mencoba mengungkapkan fungsinya dalam masyarakat tempat tumbuh paguyuban, dan mengungkapkan pula fungsi paguyuban bagi para anggotanya sendiri. Dengan memahami fungsi paguyuban dari luar dan dari dalam, maka pemahaman kita mengenai keberadaan paguyuban dalam masyarakat akan dapat menjadi lebih baik.

Di samping itu, keseluruhan data yang ada diharapkan dapat digunakan sebagai informasi kebudayaan, sehingga dapat menjadi bahan masukan dalam menentukan kebijakan pembangunan yang berkaitan dengan upaya pemerintah dan masyarakat Indonesia pada umumnya untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa.

F. Metode Perekaman

Metode yang dipakai dalam perekaman ini adalah pengamatan terlibat. Artinya perekam tinggal dan hidup

sementara dengan warga masyarakat yang akan direkam dalam beberapa hari. Dengan demikian perekam akan dapat mengamati dan memahami serta mengerti tentang hubungan sosial yang terjadi. Pengamatan terlibat ini dilengkapi pula dengan wawancara mendalam kepada orang-orang yang dianggap mewakili dan mengerti tentang paguyuban yang didirikannya melalui pedoman wawancara yang telah dipersiapkan sehingga hasilnya dapat diperoleh secara rinci.

Kemudian perolehan data dan informasi ditelesuri pula melalui studi kepustakaan. Dengan menggunakan analisis isi terhadap laporan-laporan dan hasil-hasil kajian dari berbagai kejadian yang ada di daerah perekaman, khususnya tentang pandangan anggota dan bukan anggota, fungsi paguyuban bagi anggota, hubungan paguyuban dengan paguyuban sejenis lainnya, hubungan paguyuban dengan masyarakat setempat dan hubungan paguyuban dengan pemerintah daerah.

Di samping itu, perekam mendengarkan percakapan, yang dimaksud percakapan di sini sebenarnya bukan hanya interaksi lewat kata-kata antara individu satu dengan yang lain, tetapi juga berbagai komentar, lelucon, perdebatan, pujian, umpatan, yang muncul dan dilontarkan oleh anggota-anggota paguyuban yang direkam. Sebab percakapan itu mempunyai arti yang luas. Dengan percakapan dapat diketahui hal-hal yang dirahasiakan, atau berbagai masalah intern yang dihadapi oleh paguyuban itu, sehingga dengan demikian akan dapat diketahui budaya yang hidup dalam paguyuban tersebut.

G. Susunan Laporan

Tulisan tentang “Keberadaan Paguyuban Etnik di Daerah Perantauan di kota Tanjung Pinang” ini terdiri atas 6 bab. Bab I yang merupakan pendahuluan berisi uraian singkat tentang latar belakang penelitian beserta prosedur penelitian lainnya seperti masalah, ruang lingkup, tujuan, kerangka pemikiran, metode, dan sejenisnya yang berkaitan dengan teknik penelitian.

Bab II adalah “Paguyuban Among Mitro di kota Tanjung Pinang” yang mengemukakan bagaimana gambaran umum Kota Tanjung Pinang baik kesejarahan, letak, luas, dan keadaan geografi, kondisi fisik, serta paguyuban yang terdapat di Tanjung Pinang. Tidak lupa dijelaskan pula tentang lahirnya paguyuban Among Mitro, lalu kegiatan-kegiatan paguyuban Among Mitro serta aturan-aturan, hak, dan kewajiban anggotanya.

Bab III “Peranan Paguyuban Terhadap Anggota-Anggotanya”. Di dalam bab ini diuraikan tentang bagaimana peranan paguyuban Among Mitro terhadap kehidupan sosial, kehidupan ekonomi, kehidupan budaya dan kehidupan politik anggotanya, yang terjadi di Tanjung Pinang.

Bab IV “Peranan Paguyuban Terhadap Masyarakat Sekitarnya”. Pada bab ini diterangkan bagaimana hubungan paguyuban Among dengan paguyuban lainnya. Lalu bagaimana hubungan paguyuban Among Mitro dengan masyarakat lokal. Tidak lupa bagaimana hubungan paguyuban Among Mitro dengan pemerintah daerah setempat. Akhirnya bagaimana hubungan paguyuban Among Mitro dengan pemerintah daerah asal.

Bab V “Analisis” dan Bab VI adalah Penutup yang menyajikan kesimpulan dari beberapa bab yang telah diuraikan dan beberapa saran dari penulis.

BAB II

PAGUYUBAN AMONG MITRO DI KOTA TANJUNGPINANG

A. Gambar Umum Kota Tanjungpinang

1 Kesejarahan

Tanjung Pinang, di samping sebagai kota administratif, juga sebagai ibukota Kabupaten Kepulauan Riau. Pada kurun waktu 1722--1911 ada dua Kerajaan Melayu yang berkuasa dan berdaulat, yaitu Kerajaan Riau Lingga yang berpusat di Daik dan Kerajaan Melayu Riau yang berpusat di Pulau Bintan. Jauh sebelum ditandatanganinya *Treaty of London*, kedua kerajaan tersebut dilebur menjadi satu. Wilayahnya meliputi tidak hanya Kepulauan Riau, tetapi Johor, Malaka (Malaysia), Singapura, dan sebagian kecil wilayah Indragiri Hilir. Adapun pusatnya adalah di Pulau Penyengat.

Setelah Sultan Riau meninggal (1911), Pemerintah Hindia Belanda menempatkan para petingginya sebagai *Districh Thoarden* untuk daerah yang besar dan *Onder Districh Thoarden* untuk daerah yang agak kecil. Selanjutnya, pemerintah Hindia Belanda menyatukan wilayah Riau-Lingga dengan Indragiri untuk dijadikan sebuah karesidenan yang terbagi dalam dua afdelling, yaitu (1) Afdelling Tanjungpinang yang meliputi Kepulauan Riau-Lingga, Indragiri Hilir dan Kateman yang berkedudukan di Tanjungpinang. Sebagai

penguasa tunggal dan penanggung jawab ditunjuk seorang residen, (2) Afdelling Indragiri yang berkedudukan di Rengat dan diperintah oleh Asisten Residen. Dalam tahun 1940 karesidenan ini dijadikan Residente Riau dengan dicantumkan Afdelling Bengkalis (Sumatra Timur). Selama 4 tahun (1945--1949), berdasarkan Bisluit Gubernur General Hindia Belanda tanggal 17 Juli 1947 No. 9, dibentuk daerah Zelf Bestur (Daerah Riau).

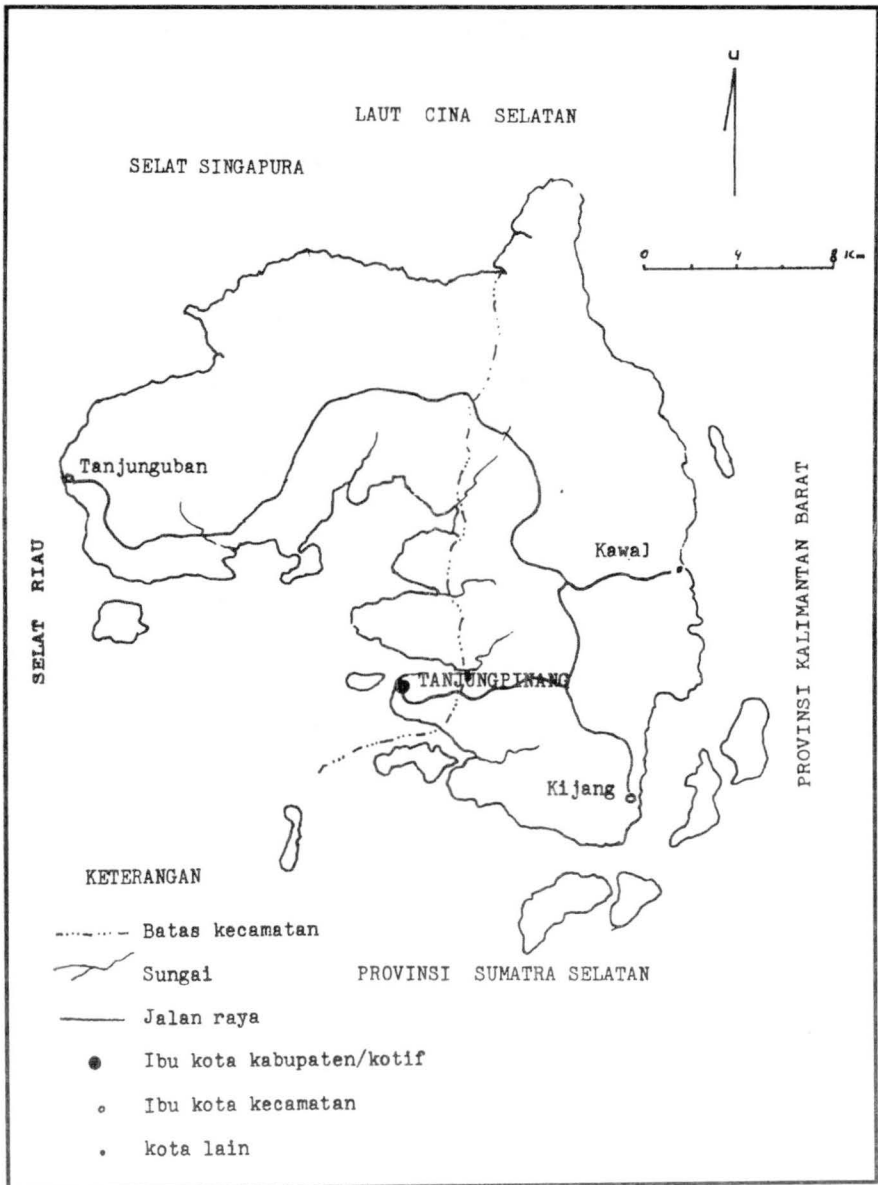
Berdasarkan surat keputusan delegasi Republik Indonesia, Propinsi Sumatra Tengah, tanggal 18 Mei 1950 No. 9/Dpert. menggabungkan diri ke dalam Republik Indonesia dan Kepulauan Riau diberi status daerah otonom tingkat II yang dikepalai oleh Bupati, yang meliputi 4 kawedanan yaitu (1) Kawedanan Tanjungpinang yang wilayahnya meliputi Kecamatan Bintan Selatan, Bintan Timur, Galang, Tanjung Pinang Barat, dan Tanjung Pinang Timur, (2) Kawedanan Karimun yang wilayahnya meliputi Kecamatan Karimun, Kundur, dan Moro, (3) Kawedanan Lingga yang wilayahnya meliputi Kecamatan Lingga, Singkep, dan Senayang, dan (4) Kawedanan Pulau Tujuh yang wilayahnya meliputi Kecamatan Jemaja, Siantan, Midai, Serasan, Tambelan, Bunguran Barat dan Bunguran Timur. Kemudian, berdasarkan surat keputusan No. 26/SK/1965 dengan memedomani instruksi Gubernur Daerah Tingkat I Riau tanggal 10 Februari 1964, No. UP/247/5/1965, tanggal 15 Nopember No. UP/255/5/1965 dan tanggal 16 Nopember 1965 No. UP/256/5/1965 menetapkan bahwa terhitung mulai tanggal 1 Januari 1966 semua daerah administratif kawedanan dalam Kabupaten Kepulauan Riau dihapuskan, diganti menjadi daerah kecamatan. Selanjutnya Kabupaten Kepulauan Riau membawahi 17 kecamatan dan wilayah desa sebanyak 127, serta 27 kelurahan.

2. Letak, Luas, dan Keadaan Geografi

Telah dikatakan bahwa Tanjung pinang di samping sebagai kota administratif juga merupakan ibukota Kabupaten

Kepulauan Riau. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1983 Tanjungpinang menjadi kota Administratif. Wilayah Kotif Tanjungpinang berbatasan dengan Kodya Batam dan Selat Riau di sebelah barat, Selat Singapura dan Laut Cina Selatan di sebelah utara, Propinsi Kalimantan Barat di sebelah timur dan dengan Propinsi Sumatra Selatan di sebelah selatan (Peta 1).

Luas wilayah Kotif Tanjungpinang yang 239,50 km² itu, terletak di Teluk Bintan dan terbagi habis menjadi 2 kecamatan atau 6 kelurahan dan 4 desa. Kecamatan-kecamatan itu adalah Tanjungpinang Timur luasnya 169 km² dan Tanjungpinang Barat luasnya 70,5 km². Kemudian ke-6 kelurahan itu adalah Tanjungpinang Kota, Tanjungpinang Barat, Kemboja, Tanjungpinang Timur, Kampung Baru dan Melayu Kota Piring. Selanjutnya ke-4 desa itu adalah Penyengat, Kampung Bugis, Donpak, dan Batu IX.



Peta 1 Kota Administratif Tanjungpinang

Kota Administratif Tanjungpinang sebagai pusat pemerintahan mempunyai sarana dan prasarana transportasi yang cukup memadai sehingga tidak terlalu sulit untuk mencapai tempat-tempat lain di sekitarnya, seperti ke kantor-kantor kelurahan maupun desa di wilayah Kota Adiministratif Tanjungpinang. Begitu juga ke tempat-tempat penting lainnya seperti kantor pemerintahan, pasar atau pertokoan, obyek wisata, sekolah-sekolah, pelabuhan Tanjungpinang, pelabuhan Kijang, terminal bus dapat dicapai dengan relatif mudah (Gambar 1, 2, 3, dan 4). Lalu lintas dalam kota jauh dekat ke tempat tujuan relatif murah, yaitu dalam satu perjalanan ke tempat terminal bus hanya Rp 500 per orang. Kemudian dari terminal bus ke pelabuhan laut Kijang dapat ditempuh sekitar 1,5 jam dengan biaya Rp 15.000 per orang atau sebaliknya.

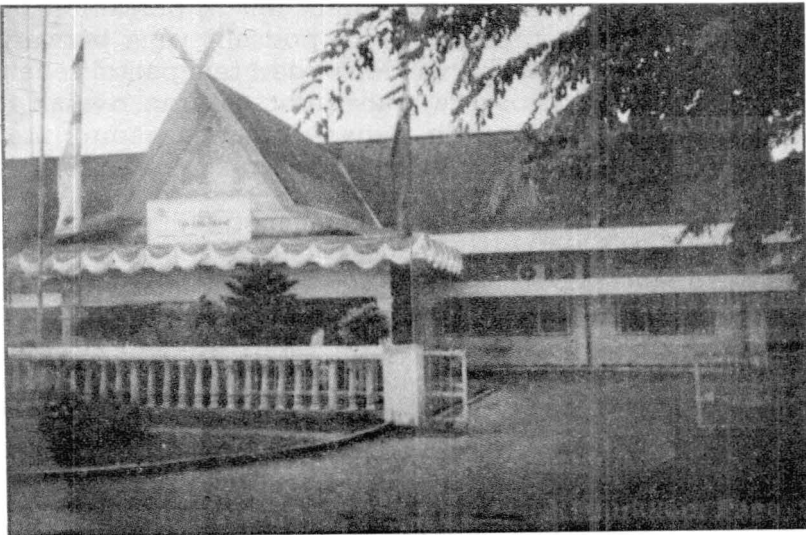
Kotif Tanjungpinang terletak di pantai bagian barat Pulau Bintan. Wilayah ini merupakan pusat perdagangan yang sangat ramai. Di samping merupakan dataran rendah pantainya aman dari benturan gelombang dan angin.

Tanahnya tergolong kurang baik untuk pertanian dan perkebunan karena tanahnya jenis podsolit yang berwarna kuning agak kemerah-merahan. Mulai dari tepi pantai sebelah barat dan terus melebar ke arah timur dataran rendah itu merupakan daerah-daerah pengembangan pemukiman, pertokoan, pendidikan, dan pengembangan kawasan industri.

Wilayah Kotif Tanjungpinang juga terletak di garis lintang Katulistiwa, sehingga wilayah ini dipengaruhi oleh 2 musim, yaitu Musim Kemarau terjadi pada bulan Februari sampai dengan bulan Agustus, Musim Hujan terjadi pada bulan September sampai dengan bulan Januari. Bulan Desember merupakan bulan dengan curah hujan tertinggi dan bulan Agustus merupakan bulan dengan curah hujan terendah. Adapun curah hujan rata-rata per tahun mencapai 2.000 mm. Curah hujan seperti ini termasuk tinggi.



Gambar 1. : Pintu Masuk Wilayah Pertokoan Tanjungpinang
Dilihat dari depan



Gambar 2. : Kantor Kota Administratif Tanjungpinang



Gambar 3. : Pelabuhan Tanjungpinang berlatar belakang Kantor Administrasi Pelabuhan Tanjungpinang



Gambar 4. : Bangunan rumah penduduk Tanjungpinang dekat pelabuhan yang kebanyakan dihuni oleh Cina

3. Kondisi Fisik

Hampir sebagian besar prasarana jalan di Kota Administratif Tanjungpinang telah diaspal. Hanya sebagian kecil saja jalan tanah yang dikeraskan. Namun demikian masih ada juga jalan tanah. Biasanya jalan tanah itu berada jauh dari pusat kota. Begitu pula kendaraan bermotor sebagai sarana transportasi, umumnya telah tersedia dalam jumlah cukup memadai. Baik mobil penumpang, mobil bus, mobil truk, pick up dan mobil tangki telah berlalu lalang di kota ini. Bahkan tersedia pula motor roda dua sebagai sarana angkutan jarak dekat. Angkutan motor roda dua ini biasa disebut ojek. Ojek di wilayah ini banyak dilakukan oleh penduduk pendatang yang berasal dari Jawa. Sedangkan bila kita akan pergi ke kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Kepulauan Riau kita dapat menggunakan kapal-kapal perintis ABRI pelabuhan Tanjungpinang.

Untuk meningkatkan sumberdaya manusia dalam dunia pendidikan formal di Kotif Tanjungpinang pada tahun 1996, tersedia sekolah taman kanak-kanak (TK) baik negeri maupun swasta sebanyak 18 buah yang meliputi 1 buah taman kanak-kanak negeri dan 17 buah taman kanak-kanak swasta. Sekolah dasar (SD) sebanyak 67 buah yang tersebar di setiap pelosok wilayah Kotif Tanjungpinang, terdiri atas 62 sekolah dasar negeri dan 5 buah sekolah dasar swasta. Sekolah menengah tingkat pertama (SLTP) sebanyak 17 buah, yang meliputi 11 SLTP negeri dan 6 SLTP swasta. Selanjutnya sekolah menengah tingkat atas (SMTA) sebanyak 13 buah, meliputi 8 SMTA negeri dan 5 SMTA swasta.

Untuk mengatasi kesehatan penduduk di Kotif Tanjungpinang telah terdapat 2 rumah sakit, 3 Puskesmas, 9 Puskesmas Pembantu, 7 Pos Keliling dan 11 balai pengobatan.

Sedangkan untuk meningkatkan iman dan taqwa kepada umatnya, di wilayah Kotif Tanjungpinang terdapat rumah-rumah ibadah, seperti mesjid/musholla, gereja, dan wihara. Mesjid berjumlah 46 buah, di Kecamatan Tanjungpinang Barat

16 buah dan di Tanjung Pinang Timur 30 buah. Musholla yang berjumlah 90 buah, 33 buah terdapat di Kecamatan Tanjung Pinang barat dan 57 buah terdapat di Kecamatan Tanjung Pinang Timur. Gereja, tempat ibadah umat Kristiani berjumlah 12 buah, 6 buah berada di Kecamatan Tanjung Pinang Barat dan 6 buah lainnya berada di Kecamatan Tanjung Pinang Timur. Sedangkan wihara sebagai tempat beribadah umat Budha ada 14 buah, 11 buah terletak di Kecamatan Tanjung Pinang Barat dan 3 buah terletak di Kecamatan Tanjung Pinang Timur.

Di Tanjungpinang terdapat sebuah museum daerah yang dikenal dengan Museum Kandil. Di museum ini terdapat berbagai koleksi benda bersejarah pada masa Kerajaan Melayu Riau. Selain itu ada juga kelenteng Cina yang dikenal dengan nama Kelenteng Senggarong. Tempat-tempat seperti ini menjadi obyek wisata peninggalan sejarah yang sangat menarik. Bahkan apabila para pengunjung yang memerlukan penginapan maupun hotel yang sederhana sampai kepada yang mewah, seperti di Sampurna Jaya, Tanjungpinang, Wisata, Wisma Riau, Sampurna Inn, Surya, dan Sondang.

4. Kependudukan

Di awal berdirinya Kotif Tanjung Pinang, berpenduduk 78.000 jiwa (1980). Namun, 13 tahun kemudian (1993) jumlah penduduknya telah meningkat menjadi 97.601 jiwa. Dan pada saat penelitian ini dilakukan (1998), jumlah penduduk di Kota Administratif Tanjung Pinang telah menjadi 106.330 jiwa, terdiri atas 54.858 laki-laki dan 51.472 perempuan dengan jumlah kepala keluarga (KK) sebanyak 21.249. ini berarti setiap satu KK berjumlah sekitar 5 orang termasuk ayah, ibu, dan anak-anaknya atau ditambah orang tua bapak, orang tua ibu atau kerabat yang lain. Jumlah penduduk laki-laki lebih besar ketimbang jumlah perempuan. Hal ini disebabkan karena para perantau umumnya adalah laki-laki dan belum sempat memboyong istrinya ke Tanjungpinang. Kepadatan penduduk kota ini mencapai 443 orang per km².

Persebaran penduduk di wilayah Kotif Tanjungpinang tidak merata. Ternyata kecamatan yang luasnya sempit justru jumlah penduduknya padat, seperti Kecamatan Tanjungpinang Barat yang luasnya 70,50 km² jumlah penduduknya 48.440 jiwa. Sedangkan Kecamatan Tanjungpinang Timur yang luasnya 169,00 km² justru jumlah penduduknya hanya sekitar 57.890 jiwa. Ini berarti kepadatan penduduk Kecamatan Tanjungpinang Barat lebih padat ketimbang Kecamatan Tanjungpinang Timur. Di Tanjung Pinang Barat kepadatannya mencapai 687 jiwa per km² dan di Kecamatan Tanjungpinang Timur hanya 343 jiwa per km².

Dilihat dari penggunaan bahasa sehari-hari di tempat umum seperti di pasar dan terminal, seolah-olah penduduk pendatang (Jawa) lebih banyak dibanding dengan penduduk asli. Di tempat-tempat umum tersebut bahasa Jawa lebih banyak digunakan dibanding bahasa Melayu. Apalagi di terminal angkot, sebagian besar pengemudi dan kernetnya orang Jawa.

Mata pencaharian penduduk Tanjungpinang cukup bervariasi. Orang Melayu sebagai penduduk asli dengan semboyannya "kalau masih ada laut buat apa pergi ke darat" umumnya bekerja sebagai nelayan, walaupun umumnya sebagai nelayan tradisional dengan penghasilan relatif rendah, tingkat pendidikan mereka umumnya rendah. Penduduk pendatang tingkat pendidikannya umumnya lebih tinggi, dan mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan yang tetap pula. Di antara mereka banyak yang bekerja sebagai pegawai negeri/ABRI, swasta, dan pedagang.

Orang-orang Cina pada umumnya bermata pencaharian sebagai pedagang seperti membuka toko-toko, baik toko makanan, barang-barang elektronik, pakaian jadi ataupun juga membuka kedai kopi. Jika dilihat dari jenis usahanya orang-orang Cina mendominasi kegiatan ekonomi di kota ini. Mereka bekerja di tempat-tempat strategis seperti di pasar dan jalan-jalan utama. Di antara mereka banyak pula yang berjualan di gang-gang atau jalan antarkampung. Pedagang bangsa

Indonesia asli hanyalah di kios-kios kecil di dalam pasar. Mereka umumnya adalah orang minang. Kebanyakan di antara mereka adalah menjual makanan. Orang Melayu Riau sedikit yang berjualan. Umumnya mereka nelayan dan menjadi pegawai negeri. Sementara itu orang Batak, khususnya yang perempuan, kebanyakan bekerja sebagai inang-inang, yang menurut bahasa Batak berarti ibu-ibu yang berdagang. Mereka menjual apa saja yang dianggap menguntungkan, seperti bawang putih, alat elektronik dan minuman kaleng. Pada saat menjelang hari raya Idul Fitri dapat dikatakan bahwa minuman kaleng yang bertumpuk di pasar daerah sekitar adalah milik inang-inang.

Walaupun roda perekonomian di Tanjungpinang dikuasai oleh orang Cina, akan tetapi nampaknya penduduk tidak mempedulikan hal tersebut. Menyadari bahwa berdagang perlu modal dan ketrampilan yang cukup baik, dan hal itu tidak mereka miliki. Pergaulan antara pendatang dan penduduk asli cukup baik. Mereka mau menerima pendatang selama tidak merusak adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat. Banyak pengetahuan maupun pengalaman yang diperoleh dari para pendatang.

Singapura sebagai tetangga dekat banyak mempengaruhi kehidupan sosial budaya masyarakat Tanjungpinang. Bahasa asing khususnya bahasa Inggris sudah banyak digunakan oleh masyarakat Tanjungpinang, walaupun pengucapannya tidak sesuai benar. Namun demikian lancar bicara telah dapat mengerti. Selain itu penduduk Tanjungpinang lebih banyak memanfaatkan siaran televisi dari Singapura dan Malaysia, daripada siaran dari Stasiun Televisi dari Jakarta. Untuk menangkap siaran televisi dari Jakarta diperlukan tiang-tiang antena yang tinggi dan memerlukan biaya yang cukup mahal.

Pada masa lalu Kepulauan Riau, khususnya Tanjungpinang sempat menjadi "magnet" bagi penduduk dari luar daerah. Salah satu faktor penariknya adalah "dollar" sehingga masa itu (sekitar tahun 50-an sampai dengan tahun 1963) sering disebut sebagai "zaman dollar". Pada zaman itu tersiar kabar bahwa seorang pegawai negeri yang ditugaskan di Tanjungpinang

merasa bagaikan mendapat “durian yang jatuh” atau “ketiban rezeki nomplok”, karena gaji yang diterima berupa dollar yang nilainya lebih tinggi dibandingkan Rupiah. Mungkin inilah yang menjadi salah satu faktor mengapa orang luar menilai masyarakat Kepulauan Riau sebagai masyarakat yang tingkat hidupnya berkecukupan, sehingga tidak mengherankan jika pada masa itu orang yang berasal dari Kepulauan Riau diperlakukan secara khusus. Di masa inilah banyak orang Jawa yang secara spontan berdatangan ke Tanjungpinang. Mereka berasal dari berbagai daerah di Jawa. Hal inilah antara lain yang menyebabkan mengapa banyak orang Jawa di Tanjungpinang. Mereka yang berhasil selanjutnya menarik sanak keluarga dari Jawa ke kota ini.

Sekitar tahun 1980-an Tanjungpinang seakan-akan tenggelam oleh pesatnya perkembangan Batam, sehingga Tanjungpinang yang dahulunya demikian terkenal kini sudah dilupakan. Padahal Batam pada waktu itu belum apa-apa. Bahkan dapat dikatakan masih berupa hutan belukar.dewasa ini Tanjungpinang mulai banyak dibicarakan orang lagi bersamaan dicanangkannya Batam-Bintan dan sekitarnya sebagai proyek kawasan industri dan pariwisata. Para pencari kerja pun berdatangan. Demikian juga para penanam modal besar. Mereka tidak hanya para pengusaha yang bergerak di bidang industri berat (penggalangan kapal yang berada di Krimun), tetapi juga para wisata sebagaimana yang terlihat di Bintan Utara (Lagoi). Pendek kata apa yang dicanangkan oleh pemerintah tentang Batam-Bintan dan sekitarnya menjadi kawasan industri dan pariwisata cepat atau lambat akan terlaksana. Ini tentunya pada gilirannya akan menyentuh berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat sekitarnya.

5. Fungsi Kota

Tanjungpinang, sebagaimana telah disebutkan pada bagian depan, adalah sebagai ibukota Kabupaten Kepulauan Riau dan sekaligus berstatus sebagai kota administrasi. Kedudukan inilah yang kemudian membawa konsekuensi dalam berbagai bidang kehidupan, baik masyarakat kota itu sendiri maupun masyarakat sekitarnya. Malahan, masyarakat negara-negara

tetangga, seperti Malaysia dan Singapura, karena tempat-tempat tersebut dapat dicapai dengan kapal dalam waktu kurang lebih 1,5 jam sampai 2,5 jam. Di kota inilah para pejabat pemerintah di tingkat II merencanakan dan mengevaluasi program-program yang dilaksanakan, baik oleh instansi di tingkat II maupun di tingkat kecamatan dan desa.

Di kota ini juga para politikus, tokoh lembaga-lembaga sosial, kepemudaan, dan lain sebagainya di tingkat II merencanakan dan mengevaluasi program-program yang dilaksanakan, baik di tingkat II itu sendiri maupun di kecamatan-kecamatan dan desa-desa yang tergabung dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Riau. lalu, Tanjungpinang dengan beberapa dermaganya (Sri Bintan dan Tanjung Uma) yang tidak hanya ditujukan bagi kapal-kapal penumpang, tetapi juga barang (cargo), pada gilirannya membuat pelabuhan tersebut sebagai pusat keluar-masuknya orang dan tempat bongkar-muat sembilan kebutuhan pokok (sembako), sayur, buah, dan barang-barang nonsembako lainnya, seperti elektronik ¹⁾, motor, dan mobil serta berbagai suku cadang dan perlengkapannya. Barang-barang tersebut sebagian dipasarkan di Kota Tanjungpinang sendiri dan sebagian lainnya di daerah sekitarnya, termasuk ke pulau-pulau yang tergabung dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Riau. Seorang pedagang kelontong yang berada di daerah Kecamatan Bintan Utara (52 kilometer ke arah utara dari Kota Tanjung Pinang) mengatakan bahwa barang-barang yang didagangkan semuanya diambil dari Tanjung Pinang. Padahal, Batam relatif dekat. Bahkan, pada pedagang yang berada di ibukota Kecamatan Uban pun sebagian besar mengambil dagangannya dari Tanjungpinang. Padahal, Batam relatif lebih dekat. Alasannya adalah kecuali elektronik, barang-barang lainnya justru lebih murah di Tanjungpinang. Belum lagi ongkos transportasi ke Batam yang jauh lebih mahal.

¹⁾ Barang elektronik sebelum krisis moneter relatif murah dibanding dengan berbagai kota di Jawa. Bahkan, luar Jawa sekalipun. Akan tetapi, sekarang harganya relatif mahal, terutama dibandingkan dengan Jakarta karena barang-barang tersebut kebanyakan didatangkan dari Jakarta, bukan dari Singapura sebagaimana yang dilakukan oleh para pedagang sebelum masa krisis.

Selain itu, Tanjungpinang bagi masyarakat sekitarnya, termasuk masyarakat yang ada di pulau-pulau, merupakan tempat untuk melanjutkan studi ke jenjang yang “lebih tinggi”.²⁾ Di daerah sekitarnya ada yang memiliki sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) dan ada pula yang belum memiliki. Bagi daerah yang belum memiliki, mau tidak mau mereka harus pergi ke Tanjungpinang untuk meneruskan studinya. Oleh karena itu, di kota ini tumbuh dan berkembang kos-kosan yang tidak hanya ditujukan bagi para pelajar, tetapi juga para pekerja yang belum mempunyai rumah sendiri.

Satu hal yang sangat menarik, khususnya berkenaan dengan tenaga kerja, adalah Tanjungpinang sebagai transit tenaga kerja yang akan dikirim ke luar negeri, khususnya Malaysia dan Singapura. Di kota inilah para calon tenaga kerja yang kebanyakan dari Jawa itu dilatih agar siap pakai.

Gambaran di atas menunjukkan bahwa Tanjungpinang, tidak hanya sebagai pusat kegiatan pemerintahan daerah tingkat II Kepulauan Riau, tetapi juga pusat kegiatan politik, ekonomi, sosial, budaya³⁾, dan malahan pertahanan dan keamanan⁴⁾. Konsekuensi logis dari kedudukannya yang demikian itu adalah Tanjungpinang berfungsi sebagai motor dam acuan dalam berbagai bidang tersebut.

6. Paguyuban yang Terdapat di Tanjungpinang

Paguyuban sukarela kaum urban yang terdapat di Kota Tanjungpinang merupakan perwujudan ikatan antara desa kota sekalipun mereka terlepas dari konteks ikatan keluarga. Nama-

²⁾ Di Tanjungpinang ada Universitas Lancang Kuning (Kampus Jauh). Mahasiswa sebagian besar pegawai negeri. Dan, hanya ada satu fakultas atau jurusan, yaitu administrasi pemerintahan, Universitas ini dikelola oleh Pemda Tingkat II Kepulauan Riau.

³⁾ Di Tanjungpinang terdapat organisasi-organisasi (lembaga/yayasan) yang bergerak dibidang kebudayaan, seperti Dewan Kesenian Kabupaten Riau, Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau, dan Sanggar Bintang Telani.

⁴⁾ Semua Angkatan ada di Tanjung Pinang, Malahan, di kota ini ada markas Angkatan Laut yang bertanggung jawab diatas keamanan wilayah Indonesia Barat.

nama paguyuban itu antara lain: Ikatan Keluarga Minang Maimbau (IKM) dari Sumatera Barat, Ikatan Keluarga Batak (IKB) dari Sumatra Utara, Persatuan Suku Flores (PSF) dari NTT, Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) dari Sulawesi Selatan, Paguyuban Pasundan dari Jawa Barat. Welas Asih (nama paguyuban orang-orang Jawa dari Yogyakarta), BETAPA (nama paguyuban orang Brebes, orang Tegal, dan orang Pekalongan) dari Jawa Tengah, Paguyuban Puji Rahayu adalah nama paguyuban orang Jawa dari Jawa Timur, PAKUMAS (nama paguyuban orang Jawa keluarga Banyumas) dari Jawa Tengah, Paguyuban Mataram dari Semarang Jawa Tengah, dan Among Mitro (nama paguyuban orang Jawa terutama dari Pacitan Jawa Timur. Begitu juga orang Melayu mempunyai Ikatan Keluarga Daik-Lingga, dan Ikatan Keluarga Dabo-Singkep. Semua paguyuban itu pada dasarnya bertujuan untuk mempererat persaudaraan.

B. Lahirnya Paguyubsan Among Mitro dan Perkembangannya

1 Sejarah

Paguyuban “Among Mitro” merupakan suatu perkumpulan para perantau Jawa berada di Tanjungpinang dan yang bersimpati kepada budaya Jawa, singkatnya adalah paguyuban warga Jawa. Among Mitro berasal dari bahasa Jawa : among berarti “mengemong “ atau “membimbing”, sedangkan “Mitro” berarti “teman”. Jadi secara harfiah berarti “mengemong” atau “membimbing”, sedangkan “mitro” berarti “teman”. Pada awalnya “Among Mitro” merupakan paguyuban para pejabat orang Jawa yang berada di Kota Tanjungpinang. Tujuan paguyuban Among Mitro adalah kumpul-kumpul sambil bernostalgia serta menyelesaikan permasalahan dinas yang tidak terselesaikan di kantor daripada menganggur dan bengong lantas berbincang-bincang serta mengadakan kegiatan arisan dan bersilaturahmi secara kekeluargaan. Dengan cara begitu dapat menghilangkan stress karena penat banyak kerja. Arisan itu diadakan sekali dalam sebulan. Tepatnya arisan dilakukan pada minggu kedua secara bergiliran. Artinya, siapa yang memperoleh arisan hari ini, kemudian arisan berikutnya ketempatan.

Pendiri paguyuban Among Mitro adalah Bapak Aryono. Bapak Aryono salah seorang Direktur Karyamina di Tanjungpinang. Mereka adalah orang Jawa yang berasal dari Kabupaten Pacitan, Propinsi Jawa Timur. Tepatnya paguyuban Among Mitro didirikan pada tahun 1973 di Kecamatan Tanjung Pinang Barat. Memang pada awalnya paguyuban "Among Mitro" berdiri jumlah anggotanya dibilang belum banyak namun dalam pelaksanaannya cukup meriah dan mengesankan bagi anggotanya. Sebab mereka dapat saling mengenal antara orang-orang Jawa yang merantau di Tanjungpinang. Tidak saja mengenal melainkan mereka dapat mempererat persahabatan yang menuju persatuan dan kekeluargaan.

Paguyuban Among Mitro, pada mulanya hanya merupakan perkumpulan yang anggotanya "terbatas" dan belum terdaftar secara resmi sebagai organisasi kemasyarakatan. Waktu itu seakan-akan anggotanya hanya para pejabat orang Jawa beserta istrinya dan atau pejabat yang bukan Jawa tetapi istrinya orang Jawa. Kesan itulah yang membuat orang Jawa yang bukan pejabat menjadi sungkan untuk bergabung. Dari 30-an orang paling-paling yang datang kurang lebih hanya separo. Ketidakhadiran mereka disebabkan oleh berbagai macam alasan. Ada yang sakit, ada yang kebetulan sedang tugas luar, maktum anggotanya kebanyakan adalah para pejabat.

Setelah beberapa lama paguyuban Among Mitro itu berjalan sangat dirasakan anggotanya kurang berkembang. Sebab anggotanya di samping ada yang telah pensiun, ada pula yang pindah, dan ada pula yang telah meninggal dunia, bahkan kadang-kadang ada pula pejabat yang baru datang dari Jawa ke Tanjungpinang. Sehingga keadaan anggota paguyuban Among Mitro boleh dikatakan pasang surut. Pada suatu ketika jumlah anggota paguyuban mengalami naik dan kadang-kadang mengalami surut. Yang jelas paguyuban Among Mitro mulai dikenal masyarakat luas sejak masa bupati daerah tingkat II Kepulauan Riau dipegang oleh orang Jawa bernama Murwanto. Untuk mempertahankan perkumpulan paguyuban Among Mitro itu kemudian muncul ide baru dari salah seorang anggota.

Antara lain mereka meminta agar perkumpulan paguyuban Among Mitro itu dikembangkan agar menjadi besar. Artinya tidak hanya pada pejabat saja anggotanya, melainkan semua orang perantauan yang berasal dari Jawa dapat ditampung pada paguyuban Among Mitro, baik di tingkat kabupaten, kecamatan maupun tingkat kelurahan/desa. Tampaknya ide tersebut diterima oleh para pengurus paguyuban Among Mitro pada saat itu. Mulailah saat itu pula paguyuban Among Mitro mengubah anggaran dasar (AD) dan anggaran rumah tangga (ART). Begitu para pengurus mulai bekerja pertumbuhan dan perkembangan perkumpulan paguyuban Among Mitro sangat menggembirakan. Tidak sedikit warga perantauan yang menjadi anggotanya. Bahkan banyak pula perkumpulan paguyuban Jawa yang terdapat di Tanjungpinang itu melebur menjadi satu dengan paguyuban Among Mitro. Sebab memang paguyuban Among Mitro di samping terkenal juga dikenal oleh masyarakat luas di Tanjungpinang. Begitu pula apabila dilihat kekompakannya, kegotongroyongannya dan kesosialannya paguyuban Among Mitro sangat membantu bagi para perantau. Hingga sekarang paguyuban tersebut semakin tumbuh dan berkembang. Sejak paguyuban Among Mitro dipimpin oleh Syamsul Kamar Yusuf BA membuat Among Mitro menjadi organisasi kemasyarakatan yang tercatat di Sospol Kabupaten Kepulauan Riau. Para pelindung dan penasehat inilah para pendobrak untuk mempersatukan berbagai pagutuban orang Jawa. Begitu juga paguyuban Among Mitro di tingkat desa ataupun tingkat kelurahan sudah tercatat di kecamatan. Jadi keberadaan paguyuban Among Mitro ini benar-benar resmi dan telah berbadan hukum.

2. Organisasi Paguyuban Among Mitro

Paguyuban Among Mitro berdasarkan anggaran dasarnya merupakan paguyuban berdaulat demokrasi, independen, mandiri, dan tidak merupakan bagian dari suatu organisasi politik. Pada dasarnya paguyuban Among Mitro berfungsi untuk menggalang persamaan langkah dalam mengisi pembangunan yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Tujuan paguyuban Among Mitro adalah untuk mempererat hubungan batin antara anggota khususnya warga Jawa di Kepulauan Riau dalam

rangka untuk saling mengenal dengan tidak memandang derajat, pangkat maupun golongan dan saling asah, asih, dan asuh di antara para anggota sehingga mewujudkan suatu masyarakat warga Jawa yang hanguri-uri kebudayaan Jawa, tepo seliro, tidak adigang, adigung, adiguna dan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Tujuan itu tercermin dalam lambang/logo paguyuban yang warna dasarnya adalah biru. Warna ini mencerminkan perdamaian. Kemudian, di atas warna dasar itu diberi warna hitam yang diberi gambar-gambar sebagai berikut:

- 1) *Gunungan* yang didalamnya ada perahu Lancang Kuning. Kemudian, di atasnya ada bungan melati yang bersinar, bertuliskan aksara Jawa yang berbunyi "*Kertaning Gambar Wanguning Dewo*."
- 2) Empat lingkaran di antara padi dan kapas. Gambar ini menunjukkan bahwa Among Mitro adalah fusi dari Among Mitro, Mataram, Welas Asih, dan Pakumas.
- 3) Padi dan kapas. Gambar ini secara keseluruhan mengartikan tentang kemakmuran dan kesejahteraan. Padi yang berjumlah 13 menunjukkan bahwa paguyuban ini didirikan pada tanggal 13. Kemudian, kapas yang berjumlah 12 menunjukkan bulan berdirinya paguyuban (Desember).
- 4) Pita berwarna putih merah yang terletak di bawah lambang perkumpulan dan bertuliskan Among Mitro mencerminkan keberanian dan keteguhan dalam memperjuangkan paguyuban.
- 5) Dua ekor merpati yang terbang berhadapan mencerminkan adanya sifat cinta damai.

Struktur paguyuban Among Mitro cukup jelas, yaitu ada ketua, sekretaris, bendahara, dan seksi-seksinya. Bahkan ada pelindung dan sesepuhnya. Begitu pula dapat dilihat dari keanggotaannya. Anggota paguyuban Among Mitro meliputi anggota biasa dan kehormatan. Anggota biasa adalah anggota yang berasal dari masyarakat/warga Jawa asli atau campuran

yang bertempat tinggal di Kepulauan Riau. Kemudian anggota kehormatan merupakan anggota yang tidak termasuk di dalam anggota biasa tetapi memberi perhatian yang serius terhadap pertumbuhan dan perkembangan Among Mitro di Kabupaten Kepulauan Riau.

Aturan yang dipatuhi oleh setiap anggota paguyuban Among Mitro telah tertuang pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang telah dikeluarkan oleh Dewan Pengurus Pusat Among Mitro Kabupaten Kepulauan Riau. Dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu telah ditentukan status dan kedaulatan, kedudukan, daerah kerja, bentuk, bendera lambang dan lagu, asas, tujuan, fungsi, usaha kegiatan paguyuban, keanggotaan, hak dan kewajiban anggota, hak dan kewajiban pengurus, alat perlengkapan, struktur, dan keputusan persidangan dan keuangan.

Misalnya, syarat keanggotaan paguyuban Among Mitro antara lain masyarakat/warga Jawa asli/campuran yang bertempat tinggal di tingkat II Kepulauan Riau. Anggota harus patuh dan taat kepada AD/ART paguyuban Among Mitro. Mau mendaftarkan diri dan mendapatkan kartu tanda anggota.

Kemudian hak anggota paguyuban Among Mitro antara lain :

- a. Setiap anggota berhak mendapatkan perlakuan yang sama di dalam paguyuban yang prioritas utama adalah saling asah, asih, dan asuh demi kemajuan bersama.
- b. Setiap anggota berhak memakmurkan atau mengembangkan paguyuban dan berhak mendapatkan pendidikan, latihan keterampilan.
- c. Setiap anggota berhak meningkatkan kualitas paguyuban dan sumber daya manusia yang ada di paguyuban dan sumber daya manusia yang ada di paguyuban dengan jalan saling bahu-membahu dan saling bergandeng tangan demi kesejahteraan paguyuban. Di samping juga anggota mempunyai hak memilih dan dipilih sebagai pengurus, juga dapat mengemukakan pendapat serta saran-saran demi perbaikan dan kemajuan paguyuban.

Adapun kewajiban anggota paguyuban Among Mitro antara lain :

- a. Setiap anggota berkewajiban menjaga nama baik dan memelihara tata krama yang melekat pada paguyuban baik di dalam maupun di luar paguyuban.
- b. Setiap anggota berkewajiban melaksanakan setiap keputusan yang dihasilkan oleh musyawarah besar maupun musyawarah cabang. Setiap anggota bertanggung jawab dan mempunyai rasa handarbeni dalam meningkatkan dan memajukan paguyuban atas dasar kebersamaan.
- c. Setiap anggota dan pengurus DPP, DPC, Komisariat dan Anggota wajib membayar iuran anggota dan uang pangkal yang telah ditentukan dengan perincian sebagai berikut:
 - 1) Di tingkat pengurus/anggota DPP setiap bulannya minimal Rp 1.500,-
 - 2) Di tingkat pengurus/anggota DPC setiap bulannya minimal Rp 1.000,-
 - 3) Di tingkat pengurus/anggota Komisariat setiap bulannya minimal Rp 500,-
- d. Masa jabatan pengurus 3 tahun untuk DPP, DPC masa kerjanya 2 tahun, komisariat satu tahun dengan sistem antar waktu.

Sementara ini jumlah anggota paguyuban Among Mitro mencapai sekitar 40.000-an jiwa yang tersebar di pelosok Kabupaten Kepulauan Riau.

Dalam periode 1995-1998 paguyuban Among Mitro tingkat Kabupaten Kepulauan Riau dipimpin oleh : Ketua Umum Syamsul Kamar Yusub B.A. yang dibantu oleh beberapa wakil ketua, seperti Ketua I koordinator bidang ekonomi dan koperasi dipimpin oleh J.F. Harsono, Ketua II koordinator bidang humas dan peranan wanita dipimpin oleh Sartopo Sodiyo SIP. Ketua III koordinator bidang sosial dan pendidikan dipimpin Bejosusanto. Ketua IV koordinator bidang kesenian dan pemuda/olah raga dipimpin oleh M. Maarif, dan Ketua V koordinator bidang pendanaan dipimpin oleh Roesakim S.H.

Kemudian Sekretaris Umum dipimpin oleh Saharuddin Satar S.H., yang dibantu oleh dua sekretaris, yaitu Sekretaris I Ir. Agus Riyanto dan Sekretaris II Sunarko S.H. Adapun Bendahara Umum dipimpin oleh Ir. Hartono, yang dibantu oleh dua bendahara, yaitu Bendahara I dipimpin oleh Ir. H. Soepono dan Bendahara II dipegang Regina Harsono. Terakhir adalah seksi-seksi pelaksana pada paguyuban pada paguyuban Among Mitro yang meliputi :

- | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Seksi Sosial | : Subiantoro |
| 2. Seksi Pendidikan | : Lamiran |
| 3. Seksi Kesenian/Kebudayaan | : Murdiyanto |
| 4. Seksi Ekonomi | : Sugiarto |
| 5. Seksi Pemuda/Olah Raga | : Sudjito |
| 6. Seksi Humas/Publikasi Dokumentasi | : Harsono |
| 7. Seksi Koperasi | : Husein Nafarim |
| 8. Seksi Peranan Wanita | : Ny. Maria Titiek P.
Angesti S.H. |
| 9. Seksi Pendanaan | : Ir. Krisnadi |
| 10. Seksi Rokhaniawan | : Drs. Daeng Rusmadi |

C. Kegiata-kegiatan Paguyuban Among Mitro

Kegiatan paguyuban Among Mitro yang tertuang di dalam anggaran dasar (AD) dan anggaran rumah tangga (ART) antara lain.

1. Mengajak seluruh masyarakat Jawa di Kepulauan Riau untuk ikut paguyuban dan ikut peran serta aktif dalam pembangunan nasional maupun pembangunan di daerah “saiyek saeko kapti, saiyek saeko proyo” dalam mencapai tujuan.
2. Membentuk suatu kegiatan koperasi dan yayasan.
3. Membentuk usaha jasa kewiraswastaan, home industry, seni budaya Jawa khususnya sehingga dapat diperkenalkan kepada turis dalam membantu pembangunan daerah.

BAB III

PERANAN PAGUYUBAN AMONG MITRO TERHADAP ANGGOTANYA

Telah dikatakan bahwa para perantau yang berasal dari Jawa di Tanjungpinang kehidupannya bervariasi. Perantau yang tinggal di perkotaan umumnya bermata pencaharian sebagai pegawai negeri, swasta, ABRI, pedagang serta bidang jasa. Sedangkan perantau yang tinggal di pedesaan atau daerah transmigrasi umumnya bermata pencaharian sebagai petani. Dengan berdirinya “Paguyuban Among Mitro”, yaitu perkumpulan warga masyarakat Jawa di perantauan diharapkan para perantau itu dapat menguri-uri budaya Jawa dan mempererat tali persaudaraan di samping pula dapat menolong orang-orang Jawa yang peranan Paguyuban Among Mitro terhadap anggotanya, seperti dalam kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan politik.

A. Kehidupan Sosial

Paguyuban Among Mitro sebagai perkumpulan warga masyarakat Jawa keberadaannya cukup mencerminkan kebudayaan Jawa. Bahasa pengantar sehari-hari yang dipergunakan dalam bincang-bincang sesama anggotanya adalah bahasa Jawa. Perilaku dan sikap yang mereka wujudkan dalam berhubungan satu sama lainnya mengacu pada saling menjaga perasaan. Hubungan seperti itu merupakan suatu ciri khas kebiasaan masyarakat Jawa.

Peranan Paguyuban Among Mitro terhadap anggotanya dalam kehidupan sosial tampak dalam kehidupan sehari-hari. Kebersamaan di antara sesama anggota sangat akrab. Mereka saling membantu bila ada kegiatan ataupun musibah. Setiap kegiatan sosial yang dilakukan selalu melibatkan anggota paguyuban. Mereka selalu membantu ala kadarnya kepada setiap anggota yang sedang mendapat kesusuhan seperti kematian ataupun sakit. Bentuk bantuan itu berupa uang yang telah ditetapkan. Tempo dulu, pemberitahuan tentang adanya krikian atau kesusahan di antara warga Paguyuban dilakukan secara getok tular atau dari mulut ke mulut, namun sekarang hal tersebut sudah dapat dilakukan melalui telepon. Dari pihak paguyuban yang datang biasanya adalah ketua atau pengurusnya yang lain. Dengan cara begitu, orang yang sedang menderita atau kesusahan terasa terobati sebab di samping ditengok warga masyarakat desa, handai taulan juga para anggota paguyuban. Bahkan mereka juga mendapat bantuan sekedarnya untuk meringankan beban baik berupa uang, beras maupun tenaga. Perlu diketahui bahwa para perantau di Tanjungpinang ini umumnya masih sedikit sanak familinya yang berada di sini, sehingga hal tersebut sangat besar manfaatnya.

Dana sosial yang dikumpulkan melalui arisan warga paguyuban setiap bulan dimanfaatkan sebagian untuk membantu orang Jawa yang kebetulan mendapat kesulitan di Tanjung Pinang. Dalam proses mencari kerja, kadang-kadang ada orang Jawa terutama yang baru pertama kali ke Tanjungpinang akan mendapat kesulitan, seperti tersesat ataupun kekurangan ongkos.

Paguyuban Among Mitro juga mempunyai kepedulian terhadap dana perantau yang akan mencari kerja di Tanjungpinang. Para pengurusnya bersedia membantu menguruskan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai salah satu persyaratan melamar kerja, ataupun membantu mempermudah kredit motor bila akan menjadi tukang ojek motor. Ojek motor sebagai salah satu butuh transportasi umum di Tanjung Pinang, banyak dilakukan oleh para perantau orang Jawa.

Tolong menolong di antara sesama anggota Paguyuban dalam hidup bertetangga cukup terasa. Kerja bakti dalam membersihkan lingkungan dengan saling pinjam-meminjam barang pecah belah meskipun salah satu bentuk tolong menolong yang bisa dilakukan. Sementara itu dalam berbagai pertemuan yang diselenggarakan, makanan kecil, dan minuman ala kadarnya senantiasa menjadi salah satu suguhnya.

Sekalipun warga masyarakat Jawa di Tanjungpinang telah mempunyai paguyuban, namun mereka biasanya juga bergabung pada perkumpulan-perkumpulan sosial budaya lainnya yang ada seperti PKK, Posyandu, dan Karang Taruna. Dalam pada itu ada pula yang tergabung dalam kelompok-kelompok pengajian masyarakat sekitar. Walaupun diantara para anggota paguyuban juga telah dibentuk kelompok-kelompok pengajiannya sendiri.

Kegiatan kelompok ini antara lain adalah mengadakan ceramah dan pengajian bersama-sama. Kegiatan ini diadakan secara bergantian di rumah anggota atau di musholla sebulan sekali. Peserta pengajian tersebut terdiri atas perempuan dan laki-laki yang telah dewasa. Pemberi ceramah dalam pengajian adalah ustad ataupun kiai, sebab ustad dan kiai itu merupakan orang yang dianggap mengerti dan luas pengetahuan agamanya. Begitu juga bagi anggota paguyuban yang beragama lain diadakan pertemuan-pertemuan. Dengan cara begitu dapat mempererat kebersamaan para warga di samping dapat meningkatkan pengetahuan agama para anggota paguyuban Among Mitro. Sebagai pelengkap peningkatan iman dan taqwa kepada para anggotanya, Paguyuban Among Mitro juga melakukan khitanan massal bagi anak-anak para anggota.

Paguyuban Among Mitro pada awalnya dibentuk untuk bernostalgia para anggotanya, berkumpul, dan berbincang-bincang bersama seta mengadakan arisan. Akan tetapi dalam perkembangannya paguyuban ini tidak hanya sekedar berkumpul-kumpul diantara anggotanya melalui arisan yang diadakan setiap bulan sekali. Melalui pertemuan-pertemuan itulah kemudian lahir hubungan sosial yang lebih jauh. Menurut

sejumlah informan menjadi anggota Paguyuban mempunyai banyak manfaat.

Sementara itu, menurut pengalaman salah seorang anggota paguyuban yang kebetulan menjadi kepala pada salah satu instansi di Kabupaten Kepulauan Riau mengatakan bahwa salah satu yang membuat hubungan kedinasan semakin lancar adalah paguyuban tersebut. Pada saat arisan seorang kepada dapat menginformasikan permasalahan kantornya dengan kepala lainnya.

B. Kehidupan Budaya

Suparlan mengatakan bahwa operasional dari kebudayaan terlihat dari pranata-pranata sosial yang ada dalam masyarakat yang bersangkutan. Pranata yang merupakan sebuah sistem antar hubungan norma-norma dan peranan itu terwujud karena digunakan untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan yang dianggap penting oleh masyarakat tersebut (Suparlan, 1995: 15).

Bertolak dari definisi tersebut, orang-orang Jawa di Tanjungpinang masih menggunakan kebudayaan Jawa sebagai pengetahuan dan keyakinan serta menjadikannya sebagai acuan bagi mereka dalam berinteraksi dengan lingkungannya dalam arti luas. Berkaitan dengan itu, sub bab ini akan membahas bagaimana kehidupan orang Jawa di rantau (Tanjungpinang).

Orang Jawa di Tanjungpinang, sebagaimana telah dikemukakan, telah mendirikan paguyuban yang bernama Among Mitro. Sebagian besar anggotanya adalah orang-orang dari Pacitan dan Banyumas dan sekitarnya. Orang Jawa yang tinggal di Tanjung Pinang cukup banyak, menurut perkiraan sekitar 40% dari jumlah penduduk seluruhnya. Kebudayaan Jawa masih mereka pegang erat.

Senioritas, tenggang rasa, azas keharmonisan yang dapat dikatakan sebagai rohnya kebudayaan Jawa, masih mereka

gunakan sebagai acuan bersikap dan bertingkah laku. Bahasa Jawa telah menjadi bahasa resmi dalam berbagai acara-acara pertemuan, seperti arisan. Sikap njawani senantiasa mereka terapkan dalam berbagai hubungan sosial yang terjalin.

Salah satu tujuan Paguyuban Among Mitro di Tanjungpinang adalah ikut mengembangkan dan melestarikan budaya Jawa. Pada peringatan Tahun Baru Jawa (1 Suro) atau bertepatan juga dengan Tahun Baru Islam (1 Muharam), Paguyuban Among Mitro selalu mementaskan pagelaran Wayang Kulit semalam suntuk. Dalang yang biasa di gunakan adalah Nji Suharni. Dalang wanita ini sering di tanggap karena tarifnya relatif murah. Akan tetapi sesekali Paguyuban juga mementaskan Ki Mantep Soedarsmo yang berkelas nasional itu.

Pagelaran wayang kulit semalam suntuk tersebut, biasanya juga di jejal penonton, baik para pemuda ataupun pemudi. Melalui pertunjukan kesenian ini diharapkan orang Jawa yang tinggal di perantauan tidak melupakan budaya Jawa. Kehadiran mereka menonton pagelaran wayang kulit tersebut, pada dasarnya juga merupakan pernyataan bentuk partisipasi aktif orang Jawa di Tanjung Pinang dalam ikut melestarikan budaya Jawa di perantauan.

Saat ini paguyuban Among Mitro, baik yang ada di tingkat desa ataupun kelurahan di Tanjung Pinang telah memiliki kelompok kesenian. Kesenian yang paling banyak dimiliki dan digemari warga paguyuban Among Mitro adalah Reog Ponorogo. Maklum, memang warga dari wilayah Jawa Timur di wilayah Tanjungpinang ini adalah yang terbanyak. Di samping itu ada pula yang memiliki kelompok kesenian kuda kepong, dan calung terutama warga yang berasal dari Banyumas. Kemudian ada pula yang mempunyai kelompok kesenian klonengan, dan wayang kulit bagi warga yang berasal dari Jawa Tengah. Yang sangat menggembirakan adalah bahwa setiap kelompok kesenian itu telah mempunyai peralatan masing-masing. Jadi kesenian Jawa tersebut cukup kental dengan pemiliknya. Pernah beberapa kali kelompok kesenian yang mengadakan festival adalah kesenian Reog Ponorogo.

Setiap 2 (dua) tahun reog tersebut selalu dipentaskan untuk semua warga di Tanjungpinang melalui festival. Dengan cara demikian kesenian reog tersebut banyak dikenal masyarakat. Bapak Suyitno selaku ketua Paguyuban Among Mitro tingkat kecamatan yang biasa memimpin festival tersebut. Pada awalnya pemain Reog Ponorogo itu adalah orang Jawa, tetapi sekarang ini justru warga non Jawa banyak yang menjadi pemainnya. Yang penting mereka itu menghendaki persatuan dan kesatuan dalam menguri-uri budaya Jawa dengan cara silaturahmi. Paling mengesankan dan membanggakan pada paguyuban Among Mitro adalah setiap hari nasional, seperti hari kemerdekaan R.I. dan setiap 1 (satu) Muharam ataupun 1 (satu) Suro selalu mengadakan pentas kesenian Jawa, entah itu wayang kulit, calung, kuda kepang maupun klonengan. Hanya dengan cara begitu kesenian Jawa menjadi tumbuh dan berkembang. Ini salah satu wujud menguri-uri budaya Jawa. Sebab pada tanggal tersebut merupakan tonggak untuk melestarikan budaya Jawa yang sangat mereka cintai. Pendek kata menjadi anggota paguyuban sangat menguntungkan sebab mereka dapat mengenal antara sesama warga masyarakat seperti layaknya keluarga sendiri. Kita tidak menjadi asing walaupun di perantauan. Bahkan tempo dulu di RRI Tanjungpinang setiap Sabtu malam selalu menyiarkan wayang kulit semalam suntuk. Sebab kebetulan yang memimpin RRI ketika itu adalah orang Jawa dan kebetulan menjadi anggota paguyuban. Ini membuktikan bahwa para pengurus paguyuban sangat berpartisipasi aktif terhadap kebudayaan Jawa.

Di samping itu ada pula cara menguri-uri budaya Jawa, yaitu setiap orang yang akan diangkat menjadi pengurus Among Mitro terlebih dulu mereka harus pandai berbahasa Jawa. Karena itu sebelum orang tersebut dilantik menjadi pengurus, terlebih dulu dilatih berbicara dengan bahasa Jawa. Bahkan proses pelantikannyapun, pengurus tersebut juga memakai bahasa Jawa. Begitu juga pakaian resmi dalam pelantikan juga menggunakan pakaian Jawa, seperti kain, blangkon, dan baju beskap. Biasanya mereka memperoleh perlengkapan itu pesan dari Pulau Jawa. Begitulah cara

menanamkan budaya Jawa di Tanjungpinang bagi para anggota paguyuban Among Mitro. Paguyuban Among Mitro sebagai perkumpulan orang Jawa merupakan wadah masyarakat Jawa dari berbagai strata sosial. Dalam perkumpulan ini ada yang termasuk sebagai golongan bangsawan, priyayi, ataupun dan wong cilik.

C. Kehidupan Ekonomi

Manfaat menjadi anggota paguyubn Among Mitro dalam menunjang kehidupan ekonomi adalah diadakannya arisan. Setiap paguyuban among Mitro, baik di tingkat kabupaten, kecamatan, kelurahan/desa sejak awal berdirinya selalu menjadikan arisan sebagai kegiatan utamanya. Hanya saja jumlah uang arisan yang dihimpun berbeda-beda. Begitu juga jumlah anggota setiap kelompok berbeda pula. Misal di tingkat kelurahan/desa besarnya uang arisan Rp. 10.000 pada setiap bulan per anggota. Kemudian uang arisan di tingkat kabupaten/kecamatan besarnya Rp. 15.000 setiap bulan per anggota dan lain sebagainya.

Arisan dilaksanakan sebulan sekali. Mereka kumpul-kumpul secara bergiliran setiap bulan pada minggu pertama/dua sesuai dengan kesepakatannya. Dengan cara seperti itu diharapkan para anggota dapat menyetor uang arisan yang telah ditentukan. Sebab pada minggu-minggu tersebut biasanya para karyawan baik swasta/negeri telah gajian dan uangnya diperkirakan belum habis sehingga setoran uang arisan dapat dipenuhi.

Uang sejumlah itu secara rinci dapat dikemukakan untuk uang persediaan konsumsi seperti minuman ataupun makanan kecil Rp. 1.000 setiap anggota. Kemudian uang simpanan wajib sebagai anggota koperasi Rp. 2.000 per anggota. Uang persiapan menjelang peringatan satu Muharam atau Sura Rp 1.000 per anggota. Persediaan dalam bidang kesosialan Rp 1.000 per anggota. Selanjutnya untuk uang kas cukup Rp 500 per anggota. Ini berarti besarnya uang arisan adalah Rp 10.000 dikurangi Rp 5.500 tinggal Rp 4.500. Apabila jumlah anggota dalam satu

kelurahan berjumlah 50 orang maka jumlah uang arisan itu terkumpul $50 \times \text{Rp } 4.500 = \text{Rp. } 225.000$. Uang itu kemudian diundi untuk 2 orang dalam sekali penarikan, agar tidak terlalu lama menunggu. Orang yang mendapat arisan pertama akan menjadi tempat arisan berikutnya. Di dalam arisan inilah baik para pengurus maupun para anggota mengadakan bincang-bincang serta ramah tamah. Di antara mereka ada juga yang berusaha untuk menumbuhkembangkan organisasi paguyuban sesuai dengan tujuannya. Di samping itu ada juga yang mengusulkan agar paguyuban dapat mensejahterakan kehidupan para anggotanya. Biasanya pendapat-pendapat itu ditampung dan pada lain kesempatan dibahas para pengurus, bagaimana sebaiknya agar kesemuanya itu dapat dicapai.

Yang cukup menarik adalah bahwa sebagian besar anggota paguyuban mengatakan uang yang diperoleh dari arisan itu sekalipun tidak besar dikatakannya merupakan hasil menabung. Sehingga hal itu tidak menjadi beban baginya. Ada pula hasil uang arisan itu digunakan untuk menambah modal usahanya. Namun umumnya mereka mengatakan hasil uang arisan itu untuk menambah kebutuhan uang dapur. Bahkan ada pula yang mengatakan dengan arisan itu dapat untuk melengkapi alat-alat rumah tangga dan lain sebagainya. Tampaknya arisan itu sangat mendukung dalam kehidupan ekonomi anggota.

Selanjutnya di samping membuat kelompok arisan, paguyuban ini juga mendirikan koperasi simpan pinjam. Hampir semua cabang paguyuban Among Mitro baik di tingkat kabupaten, kecamatan, maupun desa telah mempunyai koperasi simpan pinjam. Dengan arisan inilah anggota mengumpulkan simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela. Simpanan pokok dan simpanan wajib besarnya setiap anggota berdasarkan kesepakatan bersama. Misalnya simpanan pokok yang telah berjalan adalah Rp 10.000,- per anggota yang dapat dicicil dua kali. Kemudian simpanan wajib besarnya Rp 2.000 setiap bulan per anggota. Sedangkan simpanan sukarela bersifat bebas. Kepada penyimpan sukarela

diberikan imbalan bunga agar tidak merasa dirugikan. Karena itu tidak sedikit anggota yang mampu memberi simpanan sukarela. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, koperasi simpan pinjam dapat berjalan sebagaimana adanya.

Dengan berdirinya koperasi simpan pinjam itu anggota paguyuban banyak tertolong kebutuhannya. Seperti anggota yang pekerjaannya berdagang tahu/tempe modalnya dapat diperbesar. Dengan modal simpan pinjam para petani dapat membeli bibit ataupun pupuk. Di samping itu para anggota yang pekerjaannya ngojek dengan modal simpan pinjam dapat membeli motor sendiri. Sekarang ini para anggota paguyuban tidak merasa sulit lagi untuk menempuh hidupnya sehari-hari. Bahkan untuk kelengkapan rumah tangga juga dapat terpenuhi.

Biasanya dalam meminjam uang koperasi apabila uangnya belum cukup bagi peminjam, harus mengantri terlebih dahulu. Artinya apabila bulan ini belum dapat maka pada bulan berikutnya mendapat prioritas. Uang yang dipinjamkan anggota juga sangat ringan bunganya bila dibandingkan dengan di bank. Inilah bantuan koperasi simpan pinjam untuk menolong anggota dari himpitan lintah darat. Setiap peminjam hanya dikenakan bunga 10% yang dipotong langsung ketika meminjam pertama kali. Pelunasan dalam tempo 10 bulan. Jadi misal anggota meminjam Rp 1.000.000,- maka peminjam terima uang pinjaman sebesar Rp 900.000,- sebab dipotong 10%. Ini dimaksudkan agar uang yang dipinjam dapat memberi kesempatan yang lain pula di samping mempermudah administrasinya.

Dengan cara begitu modal koperasi simpan pinjam sekarang ini telah mampu memiliki aset Rp 10.000.000,- hingga Rp 25.000.000,- Umumnya para pemimjan dapat terpenuhi keperluannya sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Hingga kini koperasi ini masih berlangsung sebagai koperasi simpan pinjam. Menurut salah seorang koperasi pada tahun mendatang juga mau mendirikan koperasi primer atau koperasi pertokoan.

Jika para pendahulu mereka dahulu umumnya bekerja di sektor pertanian dan perdagangan kini sudah banyak yang beralih menjadi tukang dan ojek, pelayan toko, nelayan, supir taxi, karyawan swasta, pegawai negeri, pedagang sayur di pasar, pedagang keliling, buruh bangunan dan lain sebagainya.

Melihat kondisi itu Among Mitro tergerak untuk membantu mereka, khususnya bagi para pedagang dan tukang ojek, sudah barang tentu bagi mereka yang menjadi anggota. Dalam pelaksanaannya pengurus Among Mitro bekerja sama dengan dealer motor di Tanjung Pinang untuk memberikan kemudahan kredit motor bagi anggota-anggota Paguyuban.

D. Kehidupan Politik

Apabila dilihat dari latar sejarah berdirinya organisasi paguyuban Among Mitro, jelas para pendirinya berasal dari para karyawan. Umumnya karyawan itu cukup berpendidikan sehingga mereka tahu tentang pentingnya berorganisasi. Sebab dengan berorganisasi akan lebih mudah mencapai tujuan.

Selama ini paguyuban Among Mitro selalu dipimpin oleh karyawan pemerintah. Karyawan pemerintah selalu berorientasi pada KORPRI, karena itu ada upaya para pengurus untuk mengarahkan warga paguyuban Among Mitro sesuai dengan aspirasi KORPRI, yaitu ke Golongan Karya (Golkar). Namun demikian dalam kenyataannya aspirasi politik para anggota paguyuban berbeda-beda. Anggota Paguyuban yang bekerja sebagai pegawai negeri, sudah bukan rahasia umum lagi, dalam pemilihan umum (Pemilu) memilih Golkar. Berbeda dengan anggota yang pekerjaannya sebagai buruh, petani buruh, dan pedagang kecil, mereka umumnya berorientasi kepada Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Mereka menganggap dirinya adalah wong cilik, dan menurutnya PDI adalah partainya Wong Cilik, maka tepatlah apabila mereka mengutarakan aspirasinya kepada PDI. Dalam pada itu sejumlah anggota lainnya berorientasi kepada Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Sebab menurutnya PPP adalah partainya orang yang beragama Islam.

Kesadaran berpolitik para anggota paguyuban kini semakin sudah kritis sehingga tidak mudah mengiring mereka ke salah satu organisasi peserta pemilu. Kehidupan berdemokrasi para anggota kini juga sudah semakin membaik. Namun satu hal yang sangat positif yaitu walaupun secara aspiratif politik para anggota berbeda akan tetapi mereka dapat bergabung secara baik dalam paguyuban Among Mitro yang warga dirikan dan besarkan secara bersama. Paguyuban Among Mitro sendiri secara organisasi tidak mengikatkan diri ke dalam salah satu kekuatan politik.

BAB IV

PERANAN PAGUYUBAN AMONG MITRO TERHADAP MASYARAKAT SEKITARNYA

Memang hampir setiap suku bangsa yang berbeda di Tanjungpinang telah mendirikan paguyubannya masing-masing. Telah dikatakan di depan bahwa orang Minang mendirikan ikatan keluarga Minang Maimbau. Orang Batak mendirikan ikatan keluarga Batak, orang Bugis mendirikan persatuan keluarga Sulawesi Selatan, orang-orang Sunda mendirikan paguyuban Pasundan, orang Flores mendirikan persatuan suku Flores, orang Melayu mendirikan paguyuban Daik-Lingga dan orang Jawa mendirikan Among Mitro.

Tujuan didirikannya paguyuban itu antara lain adalah untuk memberikan rasa aman di samping dapat mempererat persaudaraan dan meringankan beban yang dihadapinya di rantau apabila mendapat kesulitan. Sekalipun banyak organisasi paguyuban etnik kedaerahan yang terbentuk dan tampaknya terkotak-kotak namun organisasi tersebut tetap dapat hidup berdampingan. Semua paguyuban itu tidak ingin menonjolkan diri dan tidak pula ingin memecah belah. Secara organisasi mereka saling hormat menghormati dan tahu diri sebab mereka saling menyadari bahwa dirinya adalah sesama perantau yang sedang mencari nafkah. Setiap paguyuban mempunyai pengurus yang saling mengenal, khususnya antar ketuanya. Dan, ini dimungkinkan karena Tanjungpinang adalah kota yang relatif kecil, sehingga mereka sering berjumpa dalam

berbagai kesempatan, baik yang formal maupun nonformal. Yang terpenting di antara mereka adalah tidak saling mengganggu ataupun merugikan.

Hubungan organisasi ini terhadap paguyuban lain merupakan sesuatu yang penting guna menciptakan suatu hubungan antar etnik yang dapat memunculkan pengetahuan untuk kita sehingga mengenal antara budaya satu dengan budaya yang lain. Kondisi demikian akan menyebabkan adanya persatuan dan kesatuan yang tangguh.

A. Hubungan Paguyuban Among Mitro Terhadap Paguyuban lainnya.

Dalam kehidupan sehari-hari justru dengan adanya paguyuban-paguyuban itu dapat terwujud hubungan yang cukup harmonis. Misalnya ketika ada diantara anggota paguyuban Among Mitro bertemu dengan paguyuban lain yang mata pencahariannya sama, seperti pedagang, pegawai negeri maupun supir sekalipun mereka berbeda etnik apabila sedang mendapat kesulitan/kesusahan secara pribadi, mereka ikut mengucapkan bela sungkawa dengan membantu ala kadarnya. Bahkan secara organisasi mereka juga ikut menyumbanginya, baik berupa uang atau bentuk natura yang telah ditentukan. Begitu juga sebaliknya. Ini membuktikan bahwa hubungan di antara paguyuban yang satu dengan lainnya adalah akrab.

Selanjutnya hubungan organisasi/paguyuban itu akan tampak jelas apabila ada kegiatan nasional, seperti hari ulang tahun kemerdekaan R.I. atau hari pendidikan nasional. Biasanya pada hari Sabtu malam setelah tanggal 17 Agustus diadakan malam kesenian. Malam kesenian itu bermacam-macam yang ditampilkan seperti menampilkan paduan suara dengan berbagai macam pakaian adat. Karena setiap paguyuban yang terdapat di Tanjungpinang ditunjuk untuk menampilkan pakaian adat dari suku bangsanya masing-masing, seperti pakaian adat Batak, Minang, Melayu, Jawa, Sunda, Bugis, dan Aceh. Bahkan kadang-kadang juga menampilkan kesenian etnik mereka secara bergiliran. Hal ini

dilakukan agar di antara mereka tidak ada yang merasa dianak-tirikan. Itu salah satu bentuk memberdayakan budaya etnik perantau yang terdapat di Tanjung Pinang. Sebab dengan cara seperti itu yang menjadi pelaksana dalam penampilan pakaian adat maupun kesenian daerah adalah para anggota paguyuban. Ini berarti paguyuban dapat menumbuhkembangkan budayanya masing-masing. Di samping itu di antara paguyuban yang satu dengan lainnya saling kenal dan saling berhubungan dengan baik. Uraian di atas menunjukkan bahwa hubungan antar paguyuban etnik di Kota Tanjungpinang dapat disebutkan baik karena satu dengan lainnya memahami tujuan dari didirikannya suatu paguyuban. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika dapat bekerja sama dalam mengisi suatu kegiatan, baik dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan maupun program daerah tentang kepariwisataan. Oleh karena itu, pertemuan-pertemuan yang mereka lakukan lancar-lancar saja. Ada perasaan saling menghargai antar anggota paguyuban yang satu dengan lainnya, seperti apa yang diungkapkan oleh sesepuh Among Mitro, Bapak Kardjono.

Hal senada juga dikemukakan oleh Sekretaris Umum Among Mitro Bapak Saharuddin Satar, S.H. Beliau mengatakan bahwa sekalipun terkotak-kotak tetapi tetap satu, sebab sekalipun tampak banyak semuanya tidak ingin menonjolkan dan tidak pula ingin memecah. Hal ini tampak jelas pada peringatan 17 Agustus yang masing-masing menampilkan pakaian adatnya. Selain itu, mereka mempunyai kesepakatan dalam mengisi dunia kepariwisataan. Dengan cara bergiliran mereka mementaskan keseniannya. Misalnya, minggu pertama kesenian Minang, kemudian minggu kedua kesenian Jawa, minggu ketiga kesenian Melayu, dan seterusnya. Dalam pementasan sering terlibat adanya persaingan, namun persaingan itu dapat dikatakan sehat, karena justru melalui persaingan itu akan memacu peningkatan mutu kesenian yang dipentaskan tersebut.

Diantara warga paguyuban-paguyuban yang ada di Tanjungpinang sering berlangsung pinjam-meminjam barang,

seperti peralatan pesta. Paguyuban Among Mitro sebagai paguyuban yang kebetulan memiliki perlengkapan alat-alat pesta yang cukup komplit, sering di pinjami oleh warga paguyuban lain yang akan melangsungkan acara. Cara peminjamannya cukup mudah, hanya cukup membuat permohonan kepada pengurus. Hanya sewa peralatan tidak terlalu mahal, terjangkau oleh kemampuan para warga-warga. Namun demikian bila ada yang hilang atau rusak, peminjam harus mengganti.

B. Hubungan Paguyuban Among Mitro dengan Masyarakat Lokal

Sejak awal kedatangan perantau Jawa di Tanjungpinang tidaklah menimbulkan masalah pada orang Melayu. Hal ini mungkin karena selain mata pencaharian orang Jawa umumnya berbeda dengan penduduk asli, juga etnik Jawa dapat menyesuaikan dirinya dengan adat istiadat penduduk setempat. Umumnya orang Melayu bermatapencaharian sebagai nelayan, sedang orang Jawa bekerja sebagai buruh tambang dan petani. Karena itu antara orang Jawa sebagai pendatang dan orang Melayu sebagai penduduk “asli” saling mengisi.

Menurut beberapa pihak perantau Jawa ikut mempercepat pembangunan desa di wilayah Tanjungpinang. Petani Jawa memberikan pengetahuan pertaniannya kepada orang-orang Melayu dalam hal bersawah. Orang Jawa dapat cepat membaur dengan masyarakat setempat sehingga menguntungkan bagi kegiatan ekonomi saja. Orang Jawa dan orang Melayu senantiasa membangun rasa saling pengertian sehingga kesalahpahaman jarang terjadi di antara mereka.

Perselisihan yang terjadi umumnya adalah hanya persoalan pribadi. Bila terjadi perselisihan penyelesaiannya biasanya dilakukan secara kekeluargaan dengan melibatkan ketua kelompok masing-masing. Bila kebetulan paguyuban Melayu ataupun lain memerlukan karena sedang mengadakan hajatan atau keriaan dan kekurangan peralatan seperti alat-alat

tersebut di atas dapat saja mereka meminjamnya. Hal ini yang menyebabkan paguyuban lain tidak menjadi iri. Misalnya paguyuban etnik Melayu ingin meminjam peralatan kepada paguyuban etnik Jawa boleh dengan imbalan membayar sewa yang relatif murah. Kepada anggotanya sendiri yang mengalami kekurangan akan peralatan itu dapat meminjamnya dengan tidak ditarik biaya melainkan hanya kalau ada yang pecah atau hilang menggantinya barang dengan merek yang sama sebab anggota tersebut ikut dalam mengadakan barang-barang tersebut. Pendek kata, paguyuban etnik Jawa dengan paguyuban etnik setempat (melayu) bahkan dengan paguyuban etnik lain kompak adanya. Perbedaan agama, suku dan adat istiadat di sini tidak menjadi masalah selama tidak saling menggangu. Semua itu dapat dimusyawarahkan bersama bila ada permasalahan yang muncul. Pernah terjadi perselisihan tentang tanah pekuburan di pinggiran jalan raya di daerah Kijang. Kebetulan tanah pekuburan itu milik bersama dari orang-orang yang etnik dan agamanya berbeda, seperti Islam (etnik Melayu), Protestan (etnik Batak), Hindu (etnik Bali), dan Budha (etnik Cina). Ceritanya pekuburan itu akan dipagar agar jelas pemilikannya dan tampak rapi. Karena itu terlebih dulu luasnya dibagi sesuai dengan pemilikannya. Untuk itu maka dibentuklah suatu panitia pemagaran secara bersama. Ternyata dengan cara begitu pemagaran pekuburan itu dapat diselesaikan dengan baik hingga sekarang. Padahal dulu selalu terjadi silang pendapat di antara mereka yang membawa perselesaian etnik. Namun dengan musyawarah bersama dari pemimpin-pemimpinnya dapat diselesaikan dengan baik.

Kemudian ada pula, yaitu ketika etnik Jawa mengadakan hajatan biasanya mementaskan kesenian wayang semalam suntuk maka untuk menjaga kepengaban suara pada masyarakat sekitar maka corong pengeras suara itu selalu dilepas ketika shalat Isya dan shalat Subuh berjalan. Sebab dengan suara yang terjadi itu akan mengganggu saat-saat orang-orang shalat di mesjid (musholla). Hal semacam ini dimiliki oleh etnik Jawa sehingga dengan cara seperti itu orang Melayu yang Islamik itu tidak timbul masalah karena acara

wayang kulit yang diadakan oleh etnik Jawa tidak menggungunya. Di samping kesenian wayang yang ditampilkan oleh etnik Jawa itu, diadakan pula main judi. Padahal etnik Melayu yang Islamik itu anti judi, namun karena dianggapnya etnik Jawa telah menyatu dengannya justru mereka ikut menyaksikan dan bahkan ada pula yang ikut bermain. Itulah hubungan kental yang terjadi antara etnik Melayu dan etnik Jawa di Tanjungpinang.

Diterimanya Among Mitro oleh masyarakat setempat, khususnya orang Melayu tentunya disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain keberadaan orang Jawa yang relatif lama sehingga tidak asing lagi bagi masyarakat setempat, dan prinsip keseimbangan serta tenggang rasa yang dipegang teguh oleh perantau Jawa. Ini diwujudkan dalam berbagai tingkah laku dalam kehidupan sehari-harinya. Orang Melayu sudah tahu kebiasaan orang Jawa dan sebaliknya.

Hubungan yang kental ini telah menumbuhkan perasaan senasib sepenanggungan di daerah perantauan. Hal ini menyebabkan program-program Among Mitro yang dilakukan cepat mendapat respon positif dari masyarakat sekitar sehingga dapat dikatakan Among Mitro tidak mendapat kesulitan dalam mendekati diri dengan masyarakat setempat.

Tampaknya tidak sampai di situ saja, perkawinan antara etnik Melayu dengan etnik Jawa pun telah lama terjadi. Ini berarti keberadaan etnik Jawa pun telah lama terjadi. Ini berarti keberadaan etnik Jawa di Tanjungpinang benar-benar telah diterima oleh masyarakat setempat oleh etnik Melayu. Contohnya Bapak Syamsul Kamar itu sendiri adalah orang Melayu Rengat telah kawin dengan orang Jawa, yaitu wanita dari Yogyakarta. Begitu juga Bapak Saharuddin, ia adalah orang Melayu yang beristri wanita bernama Maria Titiek P. Angesti juga orang Jawa berasal dari Surakarta dan masih banyak lagi yang lain. Yang sangat menarik perhaian buat kita bersama adalah justru orang-orang Melayu itu yang sekarang ikut menumbuhkembangkan paguyuban Among Mitro. Mengapa demikian ? Sebab mereka itulah yang sekarang

menjadi pemimpin dan sekretarisnya paguyuban Among Mitro yang cukup populer di Tanjungpinang.

C. Hubungan Paguyuban Among Mitro dengan Pemerintahan daerah Setempat

Keberadaan paguyuban di daerah ini tentunya mempunyai hubungan yang erat dengan Pemda setempat. Kenyataan demikian tidak dapat dibantah sebab semua masyarakat yang tinggal di suatu tempat dari etnik apapun tetap merupakan tanggung jawab Pemda setempat.

Hal ini terbukti hubungan pemerintah daerah setempat dengan paguyuban Among Mitro tampak jelas dan cukup akrab. Sejak paguyuban Among Mitro terbentuk hingga menjadi organisasi kemasyarakatan yang resmi telah berulang kali berhubungan dengan pemerintah daerah setempat. Seperti halnya pengurus selalu menghadap bapak kepala Ditjen. Sosial Politik setempat untuk meyakinkan kedudukan paguyuban yang didirikannya. Pengurus paguyuban itu ingin mendaftarkan secara resmi keberadaan paguyuban kepada Ditjen. Sosial Politik secara administrasi dan sekaligus minta perizinan untuk menumbuhkembangkan paguyuban Among Mitro. Tentu dengan diperolehnya pengakuan resmi dan perizinan beroperasi maka jelas bahwa hubungan paguyuban dengan pemerintah daerah setempat telah berjalan dengan baik. Untuk sampai ke Ditjen. Sosial Politik kabupaten terlebih dulu pengurus paguyuban Among Mitro berurusan melalui pemerintah daerah setempat, seperti kelurahan/desa ataupun kecamatan. Begitulah hubungan baik yang telah tercipta antara paguyuban Among Mitro dengan Pemerintah Daerah setempat.

Begitu pula apabila paguyuban Among Mitro mengadakan ulang tahun ataupun mengadakan peringatan tahun baru Islam dan tahun baru Jawa seperti 1 Muharam ataupun 1 Sura, dapat dipastikan paguyuban Among Mitro pasti mengundang aparat pemerintah daerah, seperti Bapak Bupati beserta aparatnya, beberapa Bapak Camat maupun Bapak kepala desa. Di samping itu organisasi paguyuban lain juga diundang. Yang

cukup menggembirakan adalah bahwa setiap undangan yang disebarakan itu selalu mendapat tanggapan aktif para pejabat pemerintah. Mereka selalu dapat hadir di tengah-tengah anggota paguyuban Among Mitro. Apabila mereka tidak dapat hadir pasti memberikan wakilnya untuk menghadirinya. Ini berarti bahwa hubungan paguyuban Among Mitro dengan pemerintah daerah setempat sangat kental adanya. Perhatian pemerintah daerah sangat positif kepadanya.

Sebaliknya pihak paguyuban juga membantu pemerintah daerah dalam menciptakan suasana aman, tertib di lingkungan tempat tinggalnya. Paguyuban ini aktif dalam membangun keindahan permukimannya. Sebab setiap bulan pihak paguyuban selalu mengadakan kerja bakti di daerahnya masing-masing demi kebersihan/kesehatan. Bahkan ketika pemerintah daerah setempat mengadakan penyuluhan pertanian, penyuluhan kesehatan dan lain sebagainya, warga masyarakat Jawa telah siap melaksanakan. Pokoknya bantuan yang berasal dari pemerintah daerah demi kemajuan pasti diterimanya. Ini berarti antara paguyuban dengan pemerintah daerah terjadi hubungan timbal balik yang saling menguntungkan. Dukungan yang besar terhadap tanah perantauannya diwujudkan dengan ikut memeriahkan dalam penyelenggaraan pesta kesenian Melayu. Dalam pesta ini biasanya Among Mitro ikut dalam acara karnaval. Tujuannya adalah di samping ikut memeriahkan juga sekaligus memperkenalkan budaya Jawa di tanah perantauan.

D. Hubungan Paguyuban dengan Pemerintahan Daerah Asal

Hubungan antara warga paguyuban dengan pemerintah daerah asal masih tetap ada terutama warga yang datang di Tanjungpinang, karena mutasi kepegawaian. Tidak sedikit pegawai negeri dari Jawa yang dipindah ke Tanjungpinang. Pemerintah Daerah asal memahami keberadaan warga masyarakat yang merantau ke Tanjungpinang. Pemda Ponorogo, Jawa Timur misalnya, bila mengadakan festival Reog sebagai kesenian khas di daerah ini juga mengundang perkumpulan-perkumpulan Reog yang ada di kota ini untuk mengikuti.

Orang Jawa yang tinggal di Tanjungpinang umumnya masih sering pulang “mudik”. Di samping itu mereka juga sering mengirim uang ke sanak keluarganya di kampung halaman. Menjelang Hari Raya Idul Fitri banyak di antara mereka mengirim zakat fitrah ke kampung halaman, demikian pula menjelang Hari Raya Idul Adha, mereka mengirim sejumlah uang untuk dibelikan hewan kurban. Kebiasaan tersebut sangat membantu perekonomian sanak keluarga di kampung halaman.

Rasa memiliki dan bangga pada daerah asal juga ditandai dengan ikut memperkenalkan budaya daerah asal, seperti setiap ada peringatan hari kemerdekaan 17 Agustus selalu mementaskan berbagai jenis kesenian maupun pakaian adatnya. Kesenian-kesenian daerah asal yang biasa dipentaskan antara lain wayang kulit, reog, calung, kuda kepang, dan klonengan. Sedang pakaian adat yang ditampilkan biasanya pakaian adat Jawa Timuran, Surakarta, Yogyakarta, dan Banyumas. Di samping setiap 2 (dua) tahun sekali dilaksanakan festival kesenian reog yang terdapat di Tanjungpinang, bahkan juga di bulan Muharam atau bulan Sura sebagai orang Jawa untuk menguri-uri budaya Jawa, yaitu mementaskan wayang kulit semalam suntuk. Begitu juga dengan para wisatawan selalu diperkenalkan kesenian ataupun pakaian adat daerah asal. Ini dimaksudkan apabila mereka tahu bahwa kebudayaan Jawa itu asalnya. Dengan kedatangan para wisatawan dapat menghasilkan devisa. Upaya memperkenalkan budaya daerah asal ini terjadi ketika peringatan hari kemerdekaan RI ataupun hari pendidikan nasional. Strategi ini dimanfaatkan melalui pameran dan malam kesenian yang diadakan oleh pemerintah daerah di Tanjungpinang. Biasanya setiap tahun apabila ada tampilan kesenian di Tanjungpinang pimpinan asal daerah tersebut diundang. Pernah juga mengundang bupati Ponorogo.

Upaya memperkenalkan kebudayaan Jawa juga melalui kerjasama dengan Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional di Tanjung Pinang dalam rangka lebih meningkatkan minat kaum wisatawan untuk mengetahui kesenian daerah Jawa khususnya tari, pakaian adat, maupun berbagai upacara adatnya. Dengan

mengagumi seni tari maupun pakaian dan upacara adat setempat diharapkan akan menumbuhkan perasaan ingin tahu bagi wisatawan.

Munculnya potensi-potensi daerah asal tersebut sangat diperhatikan oleh warga paguyuban Among Mitro. Bentuk perhatian itu terwujud dalam bentuk mengadakan pentas wayang kulit, reog Ponorogo, kuda kepang, dan pakaian adat daerah asal. Kesemuanya itu agar hasil karyanya dapat laku di pasaran, sedangkan warga yang bertempat tinggal di Tanjung Pinang secara timbal balik banyak memesan kelengkapan tari dari berbagai kesenian dan jenis pakaian adat yang biasa disenangi para wisatawan.

Tidaklah berlebihan apabila hubungan warga perantauan dengan pemerintah daerah asal secara umum masih cukup baik. Sebab ketika terjadi paceklik, seperti terpuruknya perekonomian Indonesia seperti sekarang ini, warga perantauan juga ikut membantu. Bantuan itu berupa uang dan bahan sembako yang dikumpulkan dari para anggota paguyuban.

BAB V

ANALISIS

A. Kekuatan Sentripetal

Perantau Jawa yang berada di wilayah Tanjungpinang secara tidak langsung telah turut mengindonesiakan daerah ini. Kehadiran orang Jawa di Tanjungpinang berarti telah menambah keanekaragaman suku bangsa yang mendiami wilayah tersebut. Jadi daerah ini bukan lagi monopoli penduduk asli setempat. Kebhinekaan suku-suku bangsa ini kelak pada saatnya akan merupakan suatu benih ketunggalikaan suku-suku bangsa, menjadi satu bangsa yaitu bangsa Indonesia.

Orang Jawa yang datang “merantau” ke Tanjungpinang pada awalnya sebagai buruh tambang bauksit, sebenarnya tidaklah mempunyai jiwa merantau, seperti orang Minang ataupun orang Batak. Mereka ke Tanjungpinang karena “terpaksa” oleh janji-janji yang akan diberikan sebagai “kuli kontrak”. Akan tetapi pada tahun-tahun berikutnya adalah para pencari kerja di bidang industri pariwisata ataupun para pegawai negeri yang dimutasikan ke Tanjungpinang. Mereka umumnya mempunyai pendidikan yang cukup dan mempunyai keterampilan.

Kehadiran orang Jawa menimbulkan kampung-kampung orang Jawa di sekitar pertambangan. Timbulnya kampung-kampung ini adalah akibat dari keinginannya untuk tetap “mangan orang mangan kumpul”. Sikap menentang penjajah

secara terbuka tidak disukai mereka. Karena itu apabila habis masa kontraknya mereka mendirikan kampung di sekitar pertambangan. Sebab orang Melayu itu tidak suka bekerja di pertambangan.

Sikap hidup orang Jawa yang tidak perlu “ngoyo” tidak perlu harus mati-matian dalam memperjuangkan pribadi, tetap mereka praktekkan di rantau. “Alon-alon waton kelakon” biar lambat asal selamat tetap dilaksanakan. Hal ini juga membuat citra orang Jawa di rantau “baik” di mata penduduk asli. Sebab kehadiran mereka di Tanjungpinang tidak menimbulkan suatu pemandangan yang kontras antar suku di sana. Mereka lebih suka sesuatu berjalan secara perlahan tetapi terus menerus dan pasti. Untuk itu mereka mengutamakan ketertiban demi kedamaian (Partokusumo, 1983).

Untuk menjaga hubungan baik mereka dengan suku-suku yang lain maka bahasa pengantar dalam kesenian tersebut terkadang juga disesuaikan yaitu menggunakan “bahasa Indonesia”, terutama dalam kesenian wayang. Dalam goro-goro, yaitu pada waktu para punakawan muncul dan berkomunikasi. Tidak mengherankan apabila kesenian wayang dikembangkan di wilayah ini juga disenangi penduduk asli.

Penggunaan bahasa Indonesia dalam goro-goro tersebut sangat disukai oleh semua pihak. Sebab ini merupakan pesan yang disampaikan melalui dialog para punakawan tersebut. Biasanya pesan-pesan itu merupakan sentilan kehidupan sehari-hari yang timbul di masyarakat. Di samping itu pula mereka menyisipkan pesan yang nadanya mendukung pembangunan. Dengan demikian kesenian Jawa yang terdapat di daerah Tanjungpinang tidak hanya dinikmati oleh orang Jawa saja, tetapi juga oleh suku-suku yang lain yang ada di daerah ini.

Kemudian karena tingkah laku orang Jawa merupakan cermin budaya Jawa maka posisi orang Jawa yang terdapat di Tanjungpinang merupakan pula unsur pemersatu antara suku-suku yang lain yang ada di daerah ini. Akibatnya benih yang terdapat di kalangan suku-suku lain di daerah ini sebagai “bangsa Indonesia” semakin subur dengan hadirnya orang Jawa

di antara mereka. Ternyata peleburan budaya bagi migran dari desa yang memiliki latar suku yang berbeda-beda, meskipun mereka telah tinggal di kota selama satu generasi atau bahkan lebih. Sebagian besar kegiatan sosial dan ekonomi orang Jawa yang di Tanjungpinang tetap menunjukkan pada pelestarian lembaga-lembaga atas dasar kesukuan (kedaerahan) dan mereka fungsikan untuk memelihara ikatan persaudaraan dengan desa tempat asal.

Budaya orang Jawa ternyata mampu menciptakan suatu pola integrasi dengan suku-suku setempat dimana mereka berada. Ini berarti orang Jawa merupakan suatu mediator antara suku-suku yang satu dengan lainnya sekalipun sebelumnya kurang dapat saling menghargai.

Tampaknya peranan sebagai mediator tersebut adalah akibat dari sikap budaya masyarakat Jawa yang dapat "ngemong". Sikap ngemong tersebut ternyata dapat menciptakan suatu suasana yang sedemikian rupa sehingga merupakan suatu wadah yang pada akhirnya dapat dirasakan sebagai suatu kesatuan yang bernama bangsa Indonesia. Ini berarti sikap budaya masyarakat Jawa mampu untuk merangkum sikap budaya suku-suku bangsa yang lain yang terdapat di Tanjungpinang khususnya dan Indonesia pada umumnya.

Kehadiran orang Jawa di Tanjungpinang secara besar-besaran ternyata membawa dampak positif bagi terbentuknya nasionalisme Indonesia. Secara fisik maupun secara psikologis pemindahan orang Jawa telah membantu terciptanya kebhinnekaan suku-suku yang terdapat di Tanjungpinang. Terbentuknya rasa nasionalisme seperti tersebut di atas bukanlah karena perlakuan yang diberikan penjajah Belanda melainkan secara baik adalah akibat dari interaksi yang baik pula dari budaya-budaya suku yang ada di daerah Tanjung Pinang. Itulah sebabnya orang-orang Jawa di wilayah ini dapat diterima. Yang cukup menggembarakan lagi bahwa kepengurusan paguyuban Among Mitro ini sudah bersifat nasional sebab pemimpinnya ada yang orang Melayu (Sahuruddin) sebagai sekretaris, orang Rengat (Syamsul

Kamar) sebagai ketua umum dan orang lainnya di luar orang Jawa.

B. Kekuatan Sentrifugal

Yang dikuatirkan berdirinya berbagai macam paguyuban etnik kedaerahan adalah apabila muncul sukuisme. Sukuisme adalah berbangga diri yang berlebihan sehingga memandang etnik lain lebih rendah. Mereka merasa paling baik, paling pintar, paling tinggi dan lain sebagainya. Dengan munculnya sukuisme mendorong terjadinya persaingan yang kurang sehat sehingga mengakibatkan terjadinya perselisihan yang pada akhirnya menuju perpecahan. Hal ini perlu diwaspadai sebab kecenderungan pada masing-masing etnik sangat besar untuk memunculkan sukuisme. Misal yang terjadi di wilayah Tanjungpinang ini ternyata etnik Minang, Batak, dan Cina cukup berperanan. Sebab etnik-etnik ini telah menduduki posisi yang penting di wilayah ini baik di bidang pemerintahan, perekonomian, dan pendidikan. Bahkan sampai dikatakan oleh sementara penduduk asli yaitu Melayu bahwa etnik Minang atau Batak sebagai penjajah di wilayah Tanjungpinang. Menurutny orang-orang Melayu dipersulit segala urusan yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan. Kebetulan saja etnik Minang dan Batak di wilayah ini cukup berperanan dan menduduki posisi yang penting di pemerintahan karena pendidikannya, sedangkan orang-orang Melayu kurang berperanan sebab pendidikannya rendah. Begitu juga etnik Jawa yang berada di wilayah Tanjungpinang umumnya dapat bersekolah di universitas karena mampu membiayainya di samping orang Jawa menginginkan anaknya pandai.

Ini berarti kedatangan para perantau di Tanjung Pinang membawa dampak negatif apabila para pengambil keputusan dan pemimpin pemerintahan kurang bijaksana dalam menangani permasalahan-permasalahan yang muncul. Itulah sebabnya para pemimpin yang ada di Tanjungpinang hendaknya benar-benar pemimpin yang Pancasilais sehingga dapat menangani berbagai etnik yang terdapat di wilayahnya. Sehingga stereotipe yang muncul itu sedikit demi sedikit dapat diantisipasi.

BAB VI

PENUTUP

Kota Tanjungpinang di samping kota administratif juga merupakan ibukota Kabupaten Kepulauan Riau. Jumlah penduduk laki-laki lebih besar dibandingkan wanita hal ini karena umumnya penduduk di wilayah ini adalah perantau. Mereka umumnya adalah laki-laki yang umurnya relatif muda dan biasanya belum berkeluarga. Kalaupun sudah berkeluarga belum sempat memboyong istri dan anak-anaknya ke Tanjungpinang.

Jenis mata pencaharian penduduk di Tanjungpinang sangat bervariasi. Penduduk asli Melayu umumnya bekerja sebagai nelayan dan pegawai negeri. Sedangkan penduduk pendatang seperti Minang, Batak, Jawa, dan Cina bekerja dalam bidang perdagangan, pendidikan, dan jasa. Sekalipun orang Cina mendominasi bidang perekonomian tetapi penduduk lainnya tidaklah memperdulikannya. Hubungan penduduk asli dan pendatang cukup harmonis.

Hubungan budaya antara kelompok-kelompok etnik yang terdapat di wilayah ini sudah berlangsung lama. Dalam kurun waktu itu masing-masing kelompok saling beradaptasi dengan lingkungan sosialnya. Salah satu bentuk adaptasi adalah munculnya berbagai macam paguyuban atau ikatan kedaerahan di antara para warga masyarakatnya. Tujuan berdirinya organisasi itu adalah untuk mempererat hubungan

batin antara anggota disamping itu untuk saling mengenal. Dengan paguyuban tersebut diharapkan mereka saling asah, asih, dan asuh di perantauan.

Paguyuban Among Mitro sebagai suatu organisasi orang-orang Jawa merupakan suatu bentuk wujud adaptasi masyarakat Jawa yang tinggal di Tanjungpinang. Secara psikologis paguyuban tersebut memberikan rasa aman, tenteram, dan mendapat kemudahan sebab berbagai beban yang dihadapi di daerah perantauan dapat segera teratasi atas bantuan teman-teman sederhana sehingga dapat mengurangi beban kehidupannya.

Berbagai pengaruh positif yang dirasakan oleh para anggotanya menjadikan paguyuban Among Mitro ini dapat tetap tumbuh dan berkembang baik secara kuantitas maupun kualitas. Secara tidak langsung berkembangnya paguyuban tersebut dapat menunjang pembangunan yang digalakkan oleh pemerintah.

Di sisi lain, keberadaan paguyuban di Tanjungpinang dapat berfungsi sebagai sarana pengenalan budaya. Melalui paguyuban-paguyuban yang ada masyarakat dari etnis lain secara tidak langsung dapat mengenal budaya-budaya di luar budaya suku bangsanya. Akan tetapi dengan pengenalan budaya itu sebenarnya juga dapat menyebabkan terjadinya persinggungan budaya menjadi lebih intens. Salah satu bentuknya adalah munculnya berbagai stereotipe di antara suku-suku bangsa yang ada. Hal inilah yang menjadi persoalan budaya pada daerah-daerah perantauan seperti Tanjungpinang. Namun demikian melalui pengenalan budaya yang terjadi singgungan-singgungan budaya tersebut dapat diredam.

Dalam bidang ekonomi paguyuban Among Mitro dapat membantu memecahkan berbagai masalah ekonomi para warganya seperti membantu mencarikan pekerjaan ataupun memberikan penambahan modal kerja. Karena hal itulah jarang dijumpai di Tanjungpinang ini orang Jawa yang menganggur. Asalkan mereka mau bekerja, ada saja pekerjaan yang dapat dilakukan, seperti menjadi tukang ojek ataupun pedagang.

Munculnya berbagai paguyuban etnik kedaerahan di Tanjungpinang sangat bermanfaat baik bagi perantau itu sendiri, pemerintah daerah asal, maupun pemerintah daerah tujuan. Di samping sebagai penyelamat para perantau sdaerah asal paguyuban juga dapat berfungsi sebagai arena dan sarana pengenalan budaya orang lain. Dengan demikian benturan-benturan budaya dapat diredam sehingga ketenteraman hidup dapat terjaga.

DAFTAR PUSTAKA

- Bappeda dan Kantor Statistik Propinsi Riau
1995 **Riau Dalam Angka 1995**
- Hardjowirogo Marbangun
1982 **Manusia Jawa**. Penerbit Idayu. Jakarta
- Geertz. C.
1965 **The Social History of an Indonesia Town** Cambrids
and Massachussettz
- Kridalaksana, Harimurti
1912 **Fungsi Bahasa dan Sikap Bahasa**. Endeh, Nusa
Indah
- Murders, Niels
1981 **Kepribadian Jawa dan Pembangunan Nasional**.
Penerbit Gajah Mada University Press. Yogyakarta
- Parto Kusuma, H. Karbono
1983 **Penggalian Unsur Kebudayaan Jawa Pada Seminar
Disiplin Nasional**. Universitas Andalas, Padang
- Sartono Kartodirdjo, ed.
1977 **Masyarakat Kuno dan Kelompok-Kelompok Sosial**.
Jakarta
- Situmorang, Sitor
1980 **Medan dan Kepeloporan Kaum Pendatang**
- Susanto, Dr. Phil Astrid S.
1983 **Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial Jakarta**.
Penerbit Binacipta

LAMPIRAN

1. DAFTAR INFORMAN

KEBERADAAN PAGUYUBAN-PAGUYUBAN ETNIS DI DAERAH PERANTAUAN DALAM MENUNJANG PEMBINAAN PERSATUAN DAN KESATUAN

No.	Nama	Umur Th.	L/P	Pendidikan	Jabatan/Pekerjaan
1.	Kardjono	77	L	SMP	Bekas Ketua Among Mitro Kabupaten/ Bekas Kodim
2.	Solichin	57	L	SMP	Ketua Among Mitro Ds. Dompok/Kepdes
3.	Maria Titie Angesti	50	P	Universitas	Ketua Seksi Peranan Wanita Among Mitro Kabupaten/Peg. Negeri
4.	Saharuddin Satar, SH	45	L	Universitas	Sekretaris Umum Among Mitro Kabupaten Peg. Negeri
5.	Zaini	50	L	SMA	mantan Lurah Kijang/ Ketua among mitro kel. Kijang Kel. Kijang
6.	Drs. Sindu Galba	50	L	Universitas	Seksi Pendidikan Among Mitro/Peg. Negeri
7.	Suyitno	49	L	SMA	Seksi Kebudayaan/ Guru
8.	Sulastri	46	P	SMP	Anggota/Pedagang
9.	Sutarno	48	L	SMU	Seksi Kebudayaan/ Guru
10.	Kasiran	54	L	SR	Anggota/petani
11.	Rusmini	51	P	SR	Anggota/bakulan
12.	Ngatimin	50	L	SR	Anggota/sopir
13.	Slamet	47	L	SMP	Anggota/tukang ojek
14.	Tasran	41	L	SMU	Anggota/pedagang
15.	Arifin	53	L	SR	Penduduk asli

2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Among Mitro

**DEWAN PENGURUS PUSAT
“AMONG MITRO”
(PAGUYUBAN WARGA JAWA)
KABUPATEN KEPULAUAN RIAU**

SEKRETARIAT : Perumnas Sei - Jang Jl. Siantan No. 12 Telp (0771) 23821 Tpi.

NOMOR : -
LAMP. : -
HAL : -

ANGGARAN DASAR

BAB I

**NAMA, STATUS DAN KEDAULATAN, KEDUDUKAN
DAERAH KERJA**

Pasal 1

NAMA

Paguyuban ini bernama “AMONG MITRO “ (Paguyuban Warga Jawa).

Pasal 2

STATUS DAN KEDAULATAN

Paguyuban ini adalah, Paguyuban yang berdaulat Demokrasi, Indenpenden- Mandiri dan tidak merupakan bagian dari suatu organisasi politik.

Pasal 3

KEDUDUKAN

Kedudukan Paguyuban ini di Tanjungpinang, Kab. Kep. Riau.

Pasal 4

DAERAH KERJA

Daerah kerja Paguyuban ini meliputi wilayah hukum Kepulauan Riau.

Pasal 5

BENTUK

Paguyuban ini berbentuk kesatuan yang mempunyai cabang-cabang di tingkat Kecamatan dan di Desa-desa/Kelurahan yang menginduk pada Paguyuban Pusat di tingkat II Kepulauan Riau.

BAB II

BENDERA, LAMBANG DAN LAGU

Pasal 6

B E N D E R A

Bendera Paguyuban dengan warna dasar Biru dan Lambang ditengah.

Pasal 7

L A M B A N G

Lambang Paguyuban mewujudkan pencerminan dari :

- Warna dasar lambang biru, yang mencerminkan perdamaian.
- Lambang warna hitam di atas warna dasar terdiri dari :
 - a. Gunungan yang didalamnya ada perahu Lancang Kuning, dan di atasnya ada bunga melati yang bersinar, bertuliskan aksara Jawa “ KERTANING GAMBAR WANGUNING DEWO “.
 - b. Empat lingkaran pada padi dan kapas menunjukkan 4 Fusi dari, Among Mitro, Mataram, Welas Asih, Pakumas.
 - c. Padi dan Kapas mencerminkan kemakmuran dan kesejahteraan yang terdiri dari 13 Padi menunjukkan

tanggal kelahirannya Paguyuban dan 12 Kapas menunjukkan bulan Desember 1994.

- d. Pita berwarna putih merah di bawah lambang perkumpulan yang bertuliskan aksara Jawa “ Among Mitro “ yang mencerminkan keberanian dan keteguhan untuk memperjuangkan Paguyuban.
- e. Dua ekor Burung Merpati yang sedang berhadapan terbang adalah menunjukkan adanya sifat warga Paguyuban yang cinta terhadap kedamaian.

Pasal 8

L A G U

Lagu Paguyuban Among Mitro adalah “ MARS AMONG MITRO “.

BAB III

ASAS, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 9

ASAS

Paguyuban “ Among Mitro “ berasaskan Pancasila dan UUD 1945 yang berlandaskan persaudaraan, dan rasa kekeluargaan diantara para anggota.

Pasal 10

TUJUAN

Paguyuban “ Among Mitro “ bertujuan untuk mempererat hubungan batin antara anggota, khususnya warga Jawa di Kepulauan Riau dalam rangka untuk saling mengenal dengan tidak memandang derajat, pangkat, maupun golongan dan saling asah, asih dan asuh diantara para anggota sehingga mewujudkan suatu masyarakat warga Jawa yang Hanguri-uri Kebudayaan Jawa, Tepo Seliro, Tidak Adigang-Adigung-Adiguno dan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Pasal 11

FUNGSI

Menggalang persamaan langkah dalam mengisi pembangunan yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

BAB IV

USAHA KEGIATAN PAGUYUBAN

Pasal 12

Kegiatan Paguyuban “ Among Mitro “ adalah sebagai berikut :

- a. Mengajak seluruh masyarakat Jawa di Kepulauan Riau untuk ikut Paguyuban dan ikut peran serta aktif dalam pembangunan nasional maupun pembangunan di daerah Saiyek Saeko Kapti, Saiyeng Saeko Proyo dalam mencapai suatu tujuan.
- b. Membentuk suatu kegiatan Koperasi dan Yayasan.
- c. Membentuk wadah atau kegiatan dibidang sosial khususnya orang-orang Jompo dan Sosial pada umunya di Kepulauan Riau.
- d. Membentuk usaha jasa kewiraswastaaan Home Industri, Seni Budaya Jawa khususnya, sehingga dapat diperkenalkan kepada Turis dalam membantu pembangunan didaerah.

BAB VI

KEANGGOTAAN

Pasal 13

SYARAT KEANGGOTAAN

Yang dapat diterima menjadi anggota Paguyuban “ Among Mitro “ adalah :

- a. Masyarakat/warga Jawa asli/campuran yang bertempat tinggal di Tingkat II Kepulauan Riau.

- b. Patuh dan taat kepada AD/ART Paguyuban.
- c. Mendaftarkan diri dan mendapatkan kartu tanda anggota.

Pasal 14

HAK ANGGOTA

- a. Memilih dan dipilih sebagai Pengurus.
- b. Setiap anggota Paguyuban “ Among Mitro “ berhak mengemukakan pendapat serta saran-saran untuk kemajuan dan perbaikan Paguyuban.

Pasal 15

KEWAJIBAN ANGGOTA

- a. Bertanggung jawab mewujudkan tujuan bersama untuk terciptanya kondisi Paguyuban yang langgeng sesuai dengan AD/ART.
- b. Bertanggung jawab dan mempunyai rasa Hander beni dalam meningkatkan dan memajukan Paguyuban atas dasar kebersamaan.
- c. Membayar uang pangkal dan iuran anggota.
- d. Menjaga nama baik Paguyuban.

BAB VI

PENGURUS

- a. Pengurus terdiri dari DPP, DPC dan Komisariat yang sekurang-kurangnya 5 orang atau lebih.
- b. Masa jabatan Pengurus 3 tahun untuk DPP, DPC masa kerjanya dua tahun dan Komisariat satu tahun dengan sistem antar waktu.
- c. Pengurus diperlukan kepemimpinannya dalam pembangunan Paguyuban.
- d. Pengurus tidak menerima gaji.

BAB VII
HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS

Pasal 16

HAK PENGURUS

- a. Pengurus Paguyuban dipilih dari dan oleh anggota dalam suatu pertemuan khusus.
- b. Pengurus Paguyuban berhak mengangkat seorang atau lebih Penasehat/Pelindung Paguyuban untuk memberikan saran-saran dan bimbingan demi kemajuan dan perbaikan Paguyuban yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Pasal 17

KEWAJIBAN PENGURUS

Pengurus mempunyai kewajiban untuk :

- a. Memimpin Paguyuban “ Among Mitro “ dengan sukarela dan sungguh-sungguh.
- b. Bertanggung jawab penuh terhadap Paguyuban baik dalam segala hal tindak maupun perbuatan hukum untuk atas nama Paguyuban.

BAB VIII

**ALAT PERLENGKAPAN, STRUKTUR DAN
KEPUTUSAN PERSIDANGAN**

Pasal 18

ALAT PERLENGKAPAN

Paguyuban ini mempunyai alat perlengkapan yang terdiri dari :

- a. Musyawarah Besar.
- b. Dewan Pertimbangan.
- c. Dewan Pengurus Pusat.
- d. Musyawarah Cabang.
- e. Dewan Pengurus Cabang.

f. Musyawarah Anggota Komisariat.

Pasal 19

STRUKTUR

Struktur Paguyuban ini terdiri dari :

- a. Dewan Pertimbangan.
- b. Dewan Pengurus Pusat.
- c. Dewan Pengurus Cabang.
- d. Pengurus Komisariat.

Pasal 20

KEPUTUSAN PERSIDANGAN

- a. Yang dimaksud persidangan adalah setiap rapat untuk mengambil keputusan ditingkat DPP, DPC dan Komisariat.
- b. Keputusan Persidangan Paguyuban ini diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan jika perlu dilakukan dengan pemungutan suara.
- c. Pemungutan suara dalam musyawarah besar dilakukan dengan sistem satu cabang satu suara.
- d. Pemungutan suara dalam musyawarah cabang dilakukan dengan sistem satu Komisariat satu suara.

BAB IX

KEUANGAN

Pasal 21

SUMBER DANA

Dana Paguyuban ini diperoleh :

- a. Uang pangkal dan uang iuran anggota.
- b. Uang bantuan sukarela yang tidak mengikat.

- c. Usaha-usaha lain yang sah dan halal.

Pasal 22

PENGGUNAAN DANA

Dana Paguyuban digunakan untuk :

- a. Pengelolaan Paguyuban.
- b. Pelaksanaan Program-program kerja Paguyuban.

Pasal 23

PERTANGGUNG JAWABAN DANA

- a. DPP mempertanggung jawabkan penggunaan dana kemusyawarahan besar.
- b. DPC mempertanggung jawabkan penggunaan dana kemusyawarahan cabang dan kepada DPP.
- c. Pengurus Komisariat mempertanggung jawabkan penggunaan dana kemusyawah anggota dan DPC.
- d. Keuangan DPP, DPC dan Komisariat sedapat mungkin dikelola secara tertib dan teratur dengan pembukaan yang konkret.

BAB X

PENUTUP

Pasal 24

PEMBUBARAN

- a. Paguyuban ini dapat dibubarkan berdasarkan Keputusan Musyawarah yang khusus berlangsung untuk maksud tersebut yang diusulkan sekurang-kurangnya tiga perempat jumlah cabang dan memperoleh persetujuan sekurang-kurangnya tiga perempat dari jumlah utusan yang hadir.
- b. DPP memberitahukan usulan pembubaran Paguyuban kepada Cabang-cabang selambat-lambatnya satu bulan sebelum Musyawarah Besar.

- c. Musyawarah Khusus memutuskan mengenai hak milik Paguyuban.

BAB XI

ATURAN PERALIHAN

Hal-hal yang belum diatur didalam Anggaran Dasar ini, akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga yang tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar.

Anggaran Dasar ini merupakan hasil Keputusan Team Perumus AD yaitu pada tanggal 22 Januari 1995, yang Team tersebut adalah,

Ketua	: JF. Harsono.
Sekretaris	: Saharuddin Satar, SH.
Anggota	: Ny. Maria Titiek P. Angesti, SH.
Anggota	: Soetopo Soedijo, S. Ip.
Anggota	: Sunarko, SH.
Anggota	: Lamiran PH.
Anggota	: Winarno Darmo Carito.
Anggota	: R. Darmadi Suweyo.

DEWAN PENGURUS PUSAT
“ A M O N G M I T R O “
(PAGUYUBAN WARGA JAWA)
KABUPATEN KEPULAUAN RIAU

SEKRETARIAT : Perumnas Sei - Jang Jl. Siantan No. 12 Telp (0771) 23821 Tpi.

NOMOR : -

LAMP. : -

HAL : -

ANGGARAN RUMAH TANGGA
AMONG MITRO (PAGUYUBAN WARGA JAWA)
KABUPATEN KEPULAUAN RIAU

Pasal 1

KEANGGOTAAN

1. Anggota terdiri dari,
 - a. Anggota Biasa, yaitu setiap anggota yang berasal dari masyarakat/warga Jawa asli atau campuran, yang bertempat tinggal di Kab. Kep. Riau.
 - b. Anggota Kehormatan, yaitu yang tidak termasuk didalam point 1a diatas, tetapi memberi perhatian yang serius terhadap Among Mitro (Paguyuban Warga Jawa) Kab. Kep. Riau.
2. Penerimaan Anggota
 - a. Anggota biasa diterima oleh Pengurus Komisariat ditingkat Desa/Kelurahan setelah memenuhi syarat penerimaan (administrasi dan pendaftaran) anggota, kemudian didaftarkan dan disahkan oleh Dewan Pengurus Cabang di tingkat Kecamatan.

- b. Anggota Kehormatan diangkat oleh Dewan Pengurus Pusat atas usul Dewan Pengurus Cabang di tingkat Kecamatan.
3. Pembebasan Keanggotaan berlaku, karena :
- 1. Meninggal dunia.
 - 2. Atas permintaan sendiri secara tertulis kepada DPC melalui Pengurus Komisariat di tingkat Desa/Kelurahan.
 - 3. Melanggar AD/ART Paguyuban, dan berhak membela diri dalam rapat anggota Komisariat di tingkat Desa/Kelurahan.
 - 4. Dipecat dengan Keputusan Rapat Anggota dan yang bersangkutan berhak membela diri didalam Musyawarah Cabang.
 - 5. Dipecat dengan Keputusan Musyawarah Cabang, yang bersangkutan berhak membela diri didalam Musyawarah Besar.

4. Hak dan Kewajiban Anggota.

Hak Anggota

- 1. Setiap anggota berhak mendapatkan perlakuan yang sama didalam Paguyuban yang prioritas utama adalah saling asah, asih dan asuh demi kemajuan bersama.
- 2. Setiap anggota berhak memakmurkan atau mengembangkan Paguyuban dan berhak mendapatkan pendidikan, latihan keterampilan.
- 3. Setiap anggota berhak meningkatkan Kualitas Paguyuban dan Sumber Daya Manusia yang ada di Paguyuban dengan jalan saling bahu membahu dan saling bergandeng tangan demi kesejahteraan Paguyuban.

Kewajiban Anggota

- 1. Setiap Anggota berkewajiban menjaga nama baik dan memelihara Tata Krama yang melekat pada Paguyuban, baik didalam maupun diluar Paguyuban.

2. Setiap Anggota berkewajiban melaksanakan setiap Keputusan yang dihasilkan oleh Musyawarah Besar maupun Musyawarah Cabang.
3. Setiap Anggota dan Pengurus DPP, DPC, Komisariat dan Anggota, wajib membayar Iuran dengan perincian sebagai berikut :
 - Di tingkat Pengurus/Anggota DPP, DPC, setiap bulannya minimal : Rp 1.500,-
 - Di tingkat Pengurus/Anggota DPC, setiap bulannya minimal : Rp 1.000,-
 - Di tingkat Pengurus/Anggota Komisariat setiap bulannya minimal : Rp 500,-
4. Daftar Anggota
 1. Daftar keanggotaan ada di DPC Tingkat Kecamatan.
 2. DPC sudah melaporkan daftar keanggotaannya kepada DPP, sekurang-kurangnya 3 bulan 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 2

MUSYAWARAH BESAR

1. Musyawarah Besar adalah Badan Tertinggi pengambil keputusan dalam Paguyuban.
2. Musyawarah Besar berlangsung sekurang-kurangnya satu kali dalam tiga tahun.
3. Musyawarah Besar berlangsung dengan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya setengah ditambah satu jumlah cabang dan atau sekurang-kurangnya setengah ditambah satu orang dari jumlah seluruh yang telah ditentukan.
4. Utusan-utusan yang menghadiri Musyawarah Besar mewakili cabang, DPC nya sudah dilantik dan disahkan oleh DPP
5. Musyawarah Besar dipimpin oleh Lima orang Majelis Pimpinan yang terdiri dari tiga orang DPC, dua orang unsur DPP yang dipih oleh Musyawarah Besar.

6. Musyawarah Besar bertugas,
 1. Menetapkan AD dan ART Paguyuban.
 2. Menilai Laporan Umum DPP.
 3. Menetapkan Garis Besar Program dan Garis Besar Kebijakanaksanaan Paguyuban, Anggaran Pendapatan dan Belanja Paguyuban.
 4. Memilih DPP.
 5. Memilih Dewan Pertimbangan.
 6. Memilih Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 3

DEWAN PENGURUS PUSAT

1. Paguyuban ini dipimpin oleh DPP.
2. DPP dipilih oleh Musyawarah Besar untuk masa kerja tiga tahun, dengan pemilihan langsung dan atau pemilihan formatur.
3. DPP sebanyak-banyaknya 12 orang dan sekurang-kurangnya 10 orang yaitu Ketua Umum, Ketua I, II, III, IV, dan V, Sekretaris Umum, Bendahara Umum dan empat orang anggota.
4. DPP dapat mengganti anggota yang tidak aktif lagi dengan caraantar waktu.
5. Anggota DPP adalah masyarakat warga Jawa asli/campuran baik perantau maupun yang telah menetap, dengan bersandar pada Kepercayaan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan setia terhadap Pancasila dan UUD 1945.
6. Susunan DPP yang dibentuk oleh Formatur harus sudah dikirmkan kepada Cabang-cabang selambat-lambatnya dua bulan sesudah Musyawarah Besar.
7. Selama DPP yang baru belum terbentuk, maka DPP yang lama masih tetap bertanggung jawab.

8. 1. DPP bertanggung jawab kepada Musyawarah Besar.
2. DPP mempersiapkan Musyawarah Besar.
9. Ketua Umum dan Ketua-Ketua lainnya serta Sekretaris Umum DPP mewakili Paguyuban kedalam dan keluar.
10. DPP dapat membentuk dan membubarkan Badan Pembantu, yang berupa Panitia Khusus atau Panitia Kerja serta Lembaga-lembaga lainnya bagi kelancaran Paguyuban.
11. DPP mengangkat dan memberhentikan DPC.
12. DPP bersidang sekurang-kurangnya 1 kali dalam satu bulan.
13. Penggantian DPP harus disertai dengan serah terima selengkap-lengkapannya.
14. Ketua Umum dan Ketua-ketua lainnya, Sekretaris Umum maupun Bendahara Umum juga Ketua/Wakil Ketua Seksi disyaratkan secara tegas di DPP, supaya jabatan tersebut dipegang oleh orang yang mempunyai wawasan kebangsaan, tidak terlibat G 30 S/PKI dan tidak pernah dihukum.

Pasal 4

DEWAN PERTIMBANGAN

1. Dewan Pertimbangan adalah suatu lembaga pengawas yang orientasinya mengawasi jalannya program yang dilaksanakan oleh DPP.
2. Apabila Dewan Pertimbangan melihat bahwa dalam menjalankan kegiatannya DPP telah menyimpang dari AD dan ART Paguyuban serta Keputusan Musyawarah Besar, maka Dewan Pertimbangan mengeluarkan Memorandum kepada DPP.
3. Apabila Memorandum pertama tidak diperhatikan oleh DPP, maka akan disusul dengan Memorandum kedua dalam masa tenggang waktu dua bulan.
4. Dengan pertimbangan terhadap Memorandum pertama dan kedua yang disampaikan kepada DPP oleh Dewan

Pertimbangan, maka dalam tempo tiga bulan sejak dikeluarkannya Memorandum kedua, Dean Pertimbangan dapat mengajukan usul mengadakan Musyawarah Luar Biasa kepada DPC, yang disetujui minimal 2/3 suara.

5. Dewan Pertimbangan dipilih oleh Musyawarah Besar untuk masa kerja tiga tahun.
6. Dewan Pertimbangan terdiri dari lima orang yaitu Ketua, Wakil Ketua dan tiga orang Anggota.
7. Anggota Dewan Pertimbangan adalah tokoh masyarakat warga Jawa asli/campuran baik perantau maupun yang telah menetap di Kab. Kep. Riau.

Pasal 5

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

1. Musyawarah Besar membentuk Badan Pemeriksa Keuangan yang anggotanya terdiri dari wakil cabang-cabang untuk memeriksa keuangan DPP dan hasil pemeriksaan tersebut dilaporkan kepada Musyawarah Besar.
2. Badan Pemeriksa Keuangan bekerja secara berkala selama masa kerja DPP diantara dua Musyawarah Besar.
3. Musyawarah Besar menerapkan pedoman kerja Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 6

MUSYAWARAH CABANG

1. Musyawarah Cabang adalah Badan yang tertinggi dalam Paguyuban di tingkat Cabang.
2. Musyawarah Cabang berlangsung sekurang-kurangnya satu kali dalam dua tahun.
3. Musyawarah Cabang berlangsung atas panggilan DPC atau atas permintaan sekurang-kurangnya setengah ditambah satu orang dari jumlah Komisariat.
4. Musyawarah Cabang berlangsung dengan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya setengah tambah satu orang dari jumlah seluruh utusan yang telah ditentukan.

5. Utusan-utusan yang menghadiri Musyawarah Cabang mewakili Komisariat yang Komisariatnya sudah dilantik dan disahkan oleh DPC.
6. Musyawarah Cabang dipimpin Pengurus Cabang oleh lima orang Majelis Pimpinan yang terdiri dari tiga orang utusan Komisariat dan dua orang dari DPC yang dipilih oleh Musyawarah Cabang.
7. Musyawarah Cabang bertugas,
 1. Menilai laporan DPC dalam melaksanakan Keputusan Musyawarah Besar, DPP dan Keputusan Musyawarah Cabang.
 2. Menyusun Program Kerja, Menetapkan Struktur, Kebijaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Cabang.
 3. Memilih Dewan Pengurus Cabang.
8. Musyawarah Cabang bertanggung jawab kepada DPP melalui DPC.
9. Musyawarah Cabang dihadiri oleh DPP.

Pasal 7

DEWAN PENGURUS CABANG

1. Cabang dipimpin oleh DPC.
2. DPC dipilih oleh Musyawarah Cabang untuk masa kerja dua tahun, dengan sistem pemilihan langsung dan atau formatur.
3. DPC sebanyak-banyaknya terdiri dari 9 orang sekurang-kurangnya lima orang yaitu Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara dan Wakil Bendahara dan dua orang anggota.
4. Susunan DPC yang telah terbentuk dilantik, dan disahkan oleh DPP dan harus dikirim kepada Komisariat selambat-lambatnya dua bulan setelah pemilihan berlangsung.
5. Anggota DPC adalah masyarakat warga Jawa asli/campuran baik perantau maupun yang telah menetap, dengan

bersandar pada kepercayaan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan setia terhadap Pancasila dan UUD 1945.

6. 1. DPC bertanggung jawab kepada Musyawarah Cabang dan DPP.
2. DPC mempersiapkan Musyawarah Cabang.
7. 1. DPC dapat membentuk dan membubarkan Badan Pembantu yang berupa Komisi, Panitia Khusus, Panitia Kerja bagi kelancaran Paguyuban.
8. DPC dapat mewakili Paguyuban di tingkat daerah Kecamatan.
9. DPC bersidang sekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan.
10. Penggantian DPC harus disertai dengan serah terima yang selengkap-lengkapnyanya.
11. Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara dan Wakil Bendahara serta Ketua/Wakil Ketua Saksi disyaratkan secara tegas di DPC, supaya jabatan tersebut dipegang oleh orang yang mempunyai wawasan kebangsaan, tidak terlibat G 30 S/PKI dan tidak pernah dihukum.

Pasal 8

MUSYAWARAH ANGGOTA KOMISARIAT

1. Musyawarah Anggota Komisariat berlangsung dengan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya setengah ditambah satu jumlah anggota Komisariat.
2. Musyawarah Anggota Komisariat dipimpin oleh tiga orang Majelis Pimpinan, terdiri dari dua orang unsur dan atau satu orang unsur Pengurus Komisariat yang dipilih oleh Rapat Anggota Komisariat.
3. Musyawarah Anggota Komisariat bertugas,
 1. Menilai laporan Pengurus Komisariat dalam melaksanakan kepengurusan Musyawarah Besar, Keputusan DPP, Keputusan Musyawarah Cabang, DPC dan Keputusan Rapat Anggota Komisariat.

2. Menyusun program kerja, menetapkan Struktur, Kebijakan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Komisariat.
4. Musyawarah Anggota Komisariat bertanggung jawab kepada DPC melalui Pengurus Komisariat.
5. Musyawarah Anggota Komisariat dihadiri oleh DPC.

Pasal9

PENGURUS KOMISARIAT

1. Komisariat dipimpin oleh Pengurus Komisariat.
2. Pengurus Komisariat sebanyak-banyaknya 7 orang dan sekurang-kurangnya terdiri 3 orang yaitu, Ketua, Sekretaris dan Bendahara.
3. Anggota Pengurus Komisariat adalah masyarakat warga Jawa asli/campuran baik perantau maupun yang telah menetap, dengan bersandar kepada kepercayaan pada Ketuhanan Yang Maha Esa, dan setia terhadap Pancasila dan UUD 1945.
4. 1. Pengurus Komisariat dipilih oleh Musyawarah Anggota dengan sistem pemilihan langsung dan atau Formatur.
2. Susunan Pengurus Komisariat yang telah terbentuk, dilantik dan disahkan oleh DPC dan harus dikirimkan kepada Anggota-anggota selambat-lambatnya satu bulan setelah pemilihan berlangsung.
5. 1. Pengurus Komisariat bertanggung jawab kepada Musyawarah Anggota Komisariat dan DPC
2. Pengurus Komisariat mempersiapkan Musyawarah Anggota Komisariat.
6. Pengurus Komisariat bersidang sekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan.
7. Pengurus Komisariat tidak dapat mewakili Paguyuban ke tingkat lebih tinggi akan tetapi dapat mewakili Paguyuban di tingkat Desa/Kelurahan.

8. Penggantian Pengurus Komisariat harus disertai dengan serah terima yang selengkap-lengkapny.
9. Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Ketua/Wakil Ketua Seksi secara tegas disyaratkan di PK, supaya jabatan tersebut dipegang oleh orang yang mempunyai wawasan kebangsaan, tidak terlibat G 30 S/PKI dan tidak pernah dihukum.
10. PK dipilih oleh Musyawarah Anggota Komisariat untuk masa kerja satu tahun, dengan sistem pemilihan langsung dan atau Formatu.

Pasal 10

SAHNYA PERSIDANGAN

Persidangan sah untuk mengambil keputusan apabila jumlah yang hadir sekurang-kurangnya setengah ditambah satu orang dari seluruh anggota persidangan.

Pasal 11

PEMBENTUKAN DAN PEMBUBARAN CABANG

1. Pembentukan dan pembubaran Cabang dilakukan oleh Pengurus Pusat, diberitahukan kepada Cabang-cabang dan dilaporkan kepada Musyawarah Besar.
2. Persyaratan Pembentukan Cabang :
 1. Di daerah Tingkat Kecamatan yang berada di Kab. Kep. Riau.
 2. Sekurang-kurangnya terdapat kesediaan tiga puluh orang untuk menjadi anggota dan masing-masing mengajukan permohonan kepada DPP.
3. Persyaratan Pembubaran Cabang :
 1. Apabila di daerah Tingkat Kecamatan tersebut tidak terdapat warga/masyarakat Jawa asli/campuran sebagai perantau atau yang telah menetap.
 2. Apabila jumlah anggota kurang dari tiga puluh orang.
4. Semua akibat Pembubaran Cabang menjadi tanggung jawab DPP.

Pasal 12

PEMBENTUKAN DAN PEMBUBARAN KOMISARIAT

1. Pembentukan dan pembubaran Komisariat dilakukan oleh DPC, dan diberitahukan kepada Komisariat-komisariat dan dilaporkan kepada DPP.
2. Persyaratan Pembentukan Komisariat,
 1. Di daerah Tingkat Desa/Kelurahan yang berada di Kab. Kep. Riau.
 2. Sekurang-kurangnya terdapat kesediaan dua puluh orang untuk menjadi anggota dan masing-masing mengajukan permohonan kepada DPC.
3. Persyaratan Pembubaran Komisariat,
 1. Apabila di daerah Desa/Kelurahan tersebut tidak terdapat warga/masyarakat Jawa asli/campuran sebagai perantau atau yang telah menetap.
 2. Apabila jumlah anggota kurang dari dua puluh orang.
4. Semua akibat Pembubaran Komisariat menjadi tanggung jawab DPC.

Pasal 13

TINDAKAN DISIPLIN

Tindakan disiplin dapat dikenakan kepada anggota atau pengurus berupa,

1. Teguran lisan dan menasehatinya.
2. Teguran tertulis.
3. Skorsing.
4. Pemberhentian sebagai Pengurus.
5. Pemecatan sebagai anggota.

Pasal 14

PERINGATAN

1. Tindakan peringatan diambil terhadap anggota/Pengurus yang merugikan Paguyuban atas dasar pertimbangan hasil rapat pengurus pada masing-masing tingkatan.

2. Tindakan yang diambil setelah melalui proses,
 1. Teguran lisan dan menasehati tiga kali.
 2. Terdapat bukti-bukti yang meyakinkan.

Pasal 15

SKORSING

1. Tindakan skorsing dikenakan kepada anggota/Pengurus karena,
 1. Setelah mendapat peringatan tertulis berturut-turut selama tiga kali.
 2. Melalaikan tugas Paguyuban.
 3. Menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi.
 4. Menyalahgunakan hak milik Paguyuban lain untuk kepentingan pribadi.
 5. Tindakan skorsing ini dilakukan oleh Pengurus Paguyuban.

Pasal 16

PEMECATAN

1. Tindakan pemecatan pengurus Paguyuban diambil setelah,
 1. Dikenakan skorsing masih melakukan tindakan kesalahan seperti pada pasal 15 di atas.
 2. Tindakan Indisipliner.
2. 1. Tindakan pemecatan terhadap pengurus Paguyuban dilaksanakan oleh Pengurus Paguyuban yang setingkat lebih tinggi atas permintaan Dewan Pengurus Paguyuban setelah rapat diadakan untuk itu.
2. Tindakan pemecatan terhadap anggota pengurus DPP dilakukan oleh sidang istimewa yang khusus diadakan untuk itu atas permintaan tertulis DPP kepada Dewan Pertimbangan berdasarkan hasil rapat.

3. Tindakan pemecatan diambil setelah melalui proses,
 - Peringatan tertulis sebanyak tiga kali.
 - Terdapatnya bukti-bukti yang meyakinkan.

Pasal 17

KEUANGAN

1. Anggota dan Pengurus baik di tingkat DPP, DPC maupun di Pengurus Komisariat diwajibkan membayar iuran wajib dan donasi menurut jumlah yang telah ditentukan.
2. Cabang dan komisariat diwajibkan sekurang-kurangnya satu kali dalam empat bulan menyerahkan sepertiga dari iuran atau donasi dan pendapatan lainnya kepada DPP demi terselenggaranya roda Paguyuban.

Pasal 18

LAMBANG DAN MARS

1. Paguyuban ini mempunyai lambang dan mars.
2. Lambang paguyuban ini terdiri dari,
 1. Panji.
 2. Bendera.
 3. Lencana.
3. Panji Paguyuban,
 1. Dibuat dari kain dengan warna dasar biru.
 2. Lambang Paguyuban yang tertera pada bendera Paguyuban bukan lambang dicap.
4. Bendera Paguyuban,
 1. Dibuat dari kain berwarna biru.
 2. Berbentuk empat persegi panjang.
 3. Ukuran bendera 130 x 110 cm.
 4. Dipergunakan dalam upacara resmi baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus Paguyuban bersama-sama dengan bendera merah putih.

- (1) Dalam upacara tingkat DPP dipergunakan bendera Paguyuban yang berukuran 130 x 110 cm.
 - (2) Dalam upacara tingkat DPC dan Komisariat dipergunakan bendera Paguyuban yang berukuran 90 x 70 cm.
 - (3) Bendera merah putih yang dipergunakan bersama-sama dengan bendera Paguyuban harus mempunyai ukuran yang sama.
5. Lencana Paguyuban,
1. Berbentuk lambang dari kuningan.
 2. Ukuran alas 3 (tiga) cm.

Pasal 20

PEMBELAAN DIRI

Pembelaan diri akibat skorsing anggota/pengurus dapat dilakukan dalam rapat-rapat pengurus masing-masing sedangkan pembelaan terhadap pemecatan dilakukan didalam Musyawarah Anggota Komisariat, Musyawarah Cabang, dan Musyawarah Besar.

Pasal 21

SEKRETARIAT

1. Di tingkat DPP, DPC dan Komisariat harus mempunyai kantor sekretariat, yang fungsinya untuk mempermudah dan mempercepat proses segala urusan administrasi, manajemen, personalia, keuangan.
2. Di tingkat DPP untuk ukuran papan nama sekretariat yaitu 90 x 45 cm.
3. Di tingkat DPC dan Komisariat ukuran papan nama sekretariat yaitu 90 x 45 cm.

Pasal 22

TINGKAT KEPUTUSAN PERSIDANGAN

1. Paguyuban ini mempunyai tingkat Keputusan dengan urutan sebagai berikut :

1. Anggaran Dasar.
2. Anggaran Rumah Tangga.
3. Keputusan Musyawarah Besar.
4. Keputusan Dewan Pengurus Pusat.
5. Keputusan Musyawarah Cabang.
6. Keputusan Dewan Pengurus Cabang.
7. Keputusan Musyawarah Anggota Komisariat.
8. Keputusan Pengurus Komisariat.

Pasal 23

PENUTUP

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini, diatur oleh DPP dalam peraturan-peraturan tersendiri yang tidak boleh bertentangan dengan prinsip jiwa dan semangat AD/ART ini.

Anggaran Rumah Tangga ini merupakan hasil Keputusan Team Perumus ART, yaitu pada tanggal 22 Januari 1995, yang mana Team tersebut adalah :

Ketua	: JF. Harsono.
Sekretaris	: Saharuddin Satar, SH.
Anggota	: Ny. Maria Titiek P. Angesti, SH.
Anggota	: Soetopo Soedijo, S. Ip.
Anggota	: Sunarko, SH.
Anggota	: Lamiran PH.
Anggota	: Winarno Darmo Carito.
Anggota	: R. Darmadi Suweyo.

DEWAN PENGURUS PUSAT
“AMONG MITRO”
(PAGUYUBAN WARGA JAWA)
KABUPATEN KEPULAUAN RIAU

SEKRETARIAT : Perumnas Sei - Jang Jl. Siantan No. 12 Telp (0771) 23821 Tpi.

NOMOR : -

LAMP. : -

HAL : -

SUSUNAN PENGURUS
AMONG MITRO (PAGUYUBAN WARGA JAWA)
KABUPATEN KEPULAUAN RIAU
PERIODE TAHUN 1995 - 1998

- PELINDUNG/PENASEHAT** : Bupati KDH TK II Kepulauan Riau
DANDIM 0315
KAJARI Tanjung Pinang.
Ny. Sri Abdul Manan.
Kardjono.
- KETUA UMUM** : Syamsul Kamar Yusuf, BA.
- KETUA I (Koordinator Bidang Ekonomi dan Koperasi)** : JF. Harsono.
- KETUA II (Koordinator Bidang Humas dan Peranan Wanita)** : Soetopo Soedijo, S. Ip.
- KETUA III (Koordinator Bidang Sosial dan Pendidikan)** : Bejo Susanto.
- KETUA IV (Koordinator Bidang Kesehatan/Kedayaan dan Pemuda/Olahraga)** : M. Maa'ruf.
- KETUA V (Koordinator Bidang Pendaan dan Kerohanian** : Roesakim, SH.

SEKRETARIS UMUM : Saharuddin Satar, SH.

SEKRETARIS I : Ir. Agus Riyanto.

SEKRETARIS II : Sunarko, SH.

BENDAHARA UMUM : Ir. Hartono.

Bendahara I : Ir. H. Soepono.

Bendahara II : Regina Harsono.

SEKSI - SEKSI

I. SEKSI SOSIAL : Subiantoro, Bc.Ip. (KETUA)
Udjiyono, SH. (WAKIL KETUA)
Rustadja.
M. Sahid.
Sugeng.
Ngadimin S.

II. SEKSI PENDIDIKAN : Lamiran PH. (KETUA)
Drs. Sindu Galba. (WAKIL KE TUA)
Ir. Suyatno, SH.

III. SEKSI KESENIAN/KEBUDAYAAN : Murdiyanto, Bc.Ip (KETUA)
Suyitno. (WAKIL KETUA)
Budiman.
Slamet.
Winarno Darmo Carito.
Katwadi.
Suhadi.
Tusiran Suseno.
Sukardi Zainuddin.
Rasimun.
P r i y o.
Hadi Suroso.

IV. SEKSI EKONOMI : Sugiarto, Bsc. (KETUA)
Subandi. (WAKIL KETUA)
Indarto.
Pardiono.
Ny. Drs. Hamidin BcHk.
Ny. Bejo Susanto.

- V. SEKSI PEMUDA DAN OLAHRAGA : Sudjito, BA. (KETUA)
Sugiarto. (WAKIL KETUA)
Lamidjo Mardi.
Sajuri.
Tariman.
- VI. SEKSI HUMAS/PUBLIKASI/DO-
KUMENTASI : Harsono. (KETUA)
Bejo Sukarto. (WAKIL KETUA)
Warsidi.
Margono.
Sukardi Arifin.
- VII. SEKSI KOPERASI : Husein Nafarin. (KETUA)
Mundhori. (WAKIL KETUA)
M. Darimi.
Waji AS.
- VIII. SEKSI PERANAN WANITA : Ny. Maria Titiek P. Angesti, SH. (KETUA)
Ny. Syamsul Kamar Yusuf, BA.
(WAKIL KETUA)
Ny. Ira Soepomo.
Ny. Ir. Krisnadi.
Ny. Ir. J. Sugito.
Ny. Sudjito, BA.
Ny. Faridah Sutopo Soedijo. S. Ip.
Ny. Sulastri.
Ny. Bejo Sukarto.
- IX. SEKSI PENDANAAN : Ir. Krisnadi. (KETUA)
Ir. J. Sugito. (WAKIL KETUA)
Drs. Hamidin, BcHk.
Abdul Majid.
Yon Aryono.
Imam Sudradjad.
Anton Pudiono.
Abu Hartono TS.

X. SEKSI KEROHANIAN

: Drs. Daeng Rusnadi. (KETUA)
H. Budiyo. (WAKIL KETUA)
Sutarno.
Ana Yon Aryono.


Panjung Pinang, 20 Mei 1995.

SAHARUDDIN SATARI, SH.
SEKRETARIS UMUM.

SYAMSUL KAHAR YUSUF, BA.
KETUA UMUM.

Perpustakaan
Jenderal

30